

SKRIPSI

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGANAN KONFLIK
ANTARA PT.PERKEBUNAN NUSANTARA DAN MASYARAKAT
MAIWA DI KABUPATEN ENREKANG

Disusun dan diusulkan oleh

ALMUKRAM

Nomor Stambuk : 105640232815



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
KANTOR & PENERBITAN

09/09/2022

-

1 exp
sumber. Alwani

-

P/0102/1PM/22 CP
ALM
P

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2022

HALAMAN JUDUL

**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGANAN KONFLIK
ANTARA PT.PERKEBUNAN NUSANTARA DAN MASYARAKAT
MAIWA DI KABUPATEN ENREKANG**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Ilmu Pemerintahan (S1)

Disusun dan Diajukan Oleh

ALMUKRAM

Nomor Stambuk : 105640232815

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2022

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi

PERAN PEMERITAH DAERAH
PENANGANAN KONFLIK ANTARA
PT.PERKEBUNAN NUSANTARA DAN
MASYARAKAT MAIWA DI
KABUPATEN ENREKANG

Nama Mahasiswa

Almukram

No Stambuk/NIM

105640323815

Program studi

Ilmu Pemerintahan

Fakultas

Ilmu Sosial dan Politik

Perguruan Tinggi

Universitas Muhammadiyah Makassar

MENYETUJUI

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Jaelan Usman, M.SI


Ahmad Taufik, S.IP., M.AP

MENGETAHUI

Dekan

Ketua Program Studi


Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si
NBM. 730 727


Ahmad Harakan, S.IP., M.H.I
NBM. 1207 163

HALAMAN PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 054/FSP/A.4-VII/XI/42/2022 sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan yang dilaksanakan di Makassar pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
TIM PENILAI

Ketua Sekretaris

Dr. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si Andi Luhur Prianto, S.IP., M.Si
NBM: 730727 NBM: 992797

PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN
PENGUJI

1. **Dr. Jaelan Usman, M.Si (Ketua)** (.....)
2. **Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si** (.....)
3. **Ahmad Harkan, S.IP., M.H.I** (.....)
4. **Ahmad Taufik, S.IP., M.AP** (.....)

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ALMUKRAM

Nomor Induk Mahasiswa : 105640232815

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Dengan ini menyatakan bahwa Proposal Penelitian dengan judul “Peran Pemerintah Daerah Penanganan Konflik Antara PT. Perkebunan Nusantara Dan Masyarakat Maiwa Di Kabupaten Enrekang”. adalah sepenuhnya karya sendiri. Tidak ada bagian di dalamnya yang merupakan plagiat dari orang lain, tidak melakukan penciplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/sanksi yang di jatuhkan kepada saya apabila kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap ketika keilmuan dalam karya ilmiah ini atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya ini.

Makassar,

2022

Yang Menyatakan


ALMUKRAM

ABSTRAK

Almukram. 2022. Peran Pemerintah Daerah dalam Penanganan Konflik antara PT. Perkebunan Nusantara dan Masyarakat Maiwa di Kabupaten Enrekang. (Di Bimbing oleh Dr. Jaelan Usman, M.SI dan Ahmad Taufik, S.IP., M. AP).

Penelitian untuk Mengetahui sebab terjadinya konflik antara masyarakat dan PT. Perusahaan Nusantara Serta Menganalisis Peran pemerintah dalam penanganan konflik antara PT. Perusahaan Nusantara dengan masyarakat Maiwa di Kabupaten Enrekang. Metode penelitian menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Subjek penelitian ini adalah Masyarakat Maiwa dan PT. Perusahaan Nusantara sendiri dan Pemerintah kabupaten Enrekang. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan lembar observasi, panduan wawancara, alat perekam suara, kamera. Dalam teknik analisis data penelitian menggunakan reduksi data, sajian data, dan verivikasi.

Hasil penelitian ini di temukan bahwa, Peran pemerintah dalam menangani konflik antara PT. Perkebunan Nusantara dengan masyarakat Maiwa di Kabupaten Enrekang: 1). Mediasi. Dalam hal ini, pemerintah kabupaten Enrekang melakukan mediasi, memfasilitasi dan mempertemukan dua bela pihak yang berkonflik sudah berjalan sebagaimana mestiya sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, yaitu sebagai orang pertama dalam mengambil kebijakan. Dalam hal ini pemerintah memiliki peran fasilitator telah memberikan Penangan terhadap konflik antara masyarakat dengan PT.PN Keera Unit Maruangin sedikit demi sedikit. Pemerintah kabupaten Enrekang tetap memberikan solusi dan jalan keluar dengan melakukan mediasi.2). Penanganan , dalam hal ini. Pemerintah telah mempertemukan kedua belah pihak baik antara Masyarakat Maiwa dan pihak PT.Perusaan Nusantara namun masih terkendala karena pihak PT. Perusaan Nusantara selalu bersikukuh bahwa mereka berkerja sudah sesuai dengan prosudur yang telah di sepakati dalam kontrak tahunan3).Verivikasi Lahan, dalam hal ini. Pemerintah Enrekang sudah melakukan verivikasi dan mengembalikan lahan masyarakat, akan pengembalian lahan yang dilakukan pemerintah tidak adil dan tidak merata. Meskipun penanganan dari pemerintah tersebut masih tergolong lemah, akan tetapi dalam hal ini pemerintah sudah bersikap netral, tanpa membedakan satu sama lainnya. Kebijakan pemerintah dalam menyikapi setiap permasalahan yang terjadi sudah tepat mempertemukan kedua belah pihak yakni Masyarakat dengan PT.PN Keera Unit Maruangin dan juga Pemerintah Enrekang melakukan verifikasi lahan tersebut harus hati-hati karena potensi konflik besar kemungkinan akan terjadi karena warga mengklaim tanah yang selama ini dikuasai oleh PT.PN hanya mengandalkan bukti alam saja tidak secara adminitrasi atau tidak mempunyai sertifikat tanah.

Kata Kunci : Peran Pemerintah. Konflik PT. Perusaan dan Masyarakat

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur atas izin dan petunjuk Allah Swt, sehingga skripsi dengan judul “Peran Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Konflik Antara PT. Perkebunan Nusantara Dan Masyarakat Maiwa Di Kabupaten Enrekang” dapat terselesaikan. Pernyataan rasa syukur kepada Allah Swt, atas apa yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan karya ini yang tidak dapat diucapkan dengan kata-kata dan tulisan dengan kalimat apapun. Tak lupa juga penulis panjatkan Shalawat dan Salam atas junjungan Nabiullah Muhammad Saw, dengan segala petunjuk, kesehatan, dan nasihat agama.

Tidak lupa penulis menghanturkan terimakasih yang sedalam-dalamnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Ayahanda Alm.Rasulu dan Ibunda Haima selaku orang tua atas segala pengorbanan dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam mengajar dan mendidik sejak kecil sampai sekarang ini. Semoga yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi kebaikan dan kebahagiaan.
2. Ayahanda DR. Jaelani Usman M.Si. selaku pembimbing I dan Ahmad Taufik, S.IP., M.AP. sebagai pembimbing II yang senantiasa memberikan masukan dan arahan serta bimbingan dalam penyempurnaan skripsi ini.
3. Ibunda Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si, ketua jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Ibunda Dr. Ihyani Malik, S. Sos, M.Si Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Univetrstias Muhammadiyah Makassar.
5. Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.ag, Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
6. Ayahanda dan ibunda dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

7. Untuk teman-teman yang sudah membantu memberikan solusi dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga segala bantuan dan bimbingannya mendapatkan balasan yang setimpal dari sisi Allah Swt sebagai amal ibadah, Amin. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini banyak kekurangan. Oleh karena itu kritik saran yang membangun dari berbagai pihak penulis sangat harapkan demi perbaikan-perbaikan kedepan.



DAFTAR ISI

SKRIPSI	i
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iii
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Tinjauan Karya Terdahulu	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Tinjauan Teoritis.....	15
1. Teori Konflik.....	15
2. Konflik Sosial.....	18
3. Konsep Peran pemerintah.....	20
B. Kerangka Fikir	24
C. Fokus Penelitian.....	26
D. Deskripsi Fokus Penelitian.....	26
BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	28
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	28

C. Sumber Data.....	29
D. Teknik Pengumpulan Data.....	29
E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	30
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	34
A. Gambaran Umum Kabupaten Enrekang	34
B. Letak dan Kondisi Geografis	36
C. Jumlah Penduduk Kabupaten Enrekang.....	38
D. Gambaran Umum Kecamatan Maiwa.....	39
E. Sejarah Perusahaan	40
F. Histori konflik	44
G. Penyerobotan lahan warga oleh PT.Perkebunan Nusantara.....	48
H. Tuntutan warga untuk mengembalikan lahanya	49
I. Peran pemerintah sebagai mediasi dalam penanganan konflik antara PT.Perkebunan Nusantara dan masyarakat Maiwa di Kabupaten Enrekang.....	51
J. Peran pemerintah dalam Penanganan konflik antara PT.Perkebunan Nusantara dan masyarakat Maiwa di Kabupaten Enrekang	63
K. Peran pemerintah dalam Menverifikasi lahan yang terdampak konflik antara PT.Perkebunan Nusantara dan masyarakat Maiwa di Kabupaten Enrekang.....	67
BAB V PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran.....	71
Daftar Pustaka	73
Lampiran	75

BAB I PENDAHULAUN

A. Latar Belakang

Masalah konflik di Indonesia merupakan fenomena yang tidak asing lagi dan menyitah perhatian publik karena wujudnya yang sebagian besar telah mengarah pada suatu kekerasan sosial dan telah meluas pada berbagai lapisan masyarakat. Pada umumnya konflik diakibatkan oleh perbedaan pendapat, pemikiran, ucapan, dan perbuatan. Sikap dasar yang sulit dan tidak ingin menerima dan menghadapi perbedaan semacam itu akan mengubah seseorang berwatak suka berkonflik. Orang seperti ini akan membuat problem kecil dan sederhana sebagai alasan untuk menciptakan konflik. Konflik sebagai saluran akumulasi perasaan yang tersembunyi secara terus-menerus mendorong seseorang untuk berperilaku dan melakukan sesuatu berlawanan dengan orang lain. Sebuah keinginan ambisi yang kuat bahkan menyebabkan terjadinya konflik antar perorangan, sedangkan dorongan emosi yang kuat untuk menyalahkan orang lain akan menyebabkan seseorang terlihat konflik dengan orang lain.

Setiap individu dalam masyarakat memiliki perspektif yang berbeda tentang hidup dan masalah-masalahnya. Perbedaan perspektif tersebut disebabkan karena masing-masing kita memiliki sejarah dan karakter yang unik, dilahirkan dalam cara hidup tertentu serta masing-masing kita memiliki nilai-nilai yang memandu pikiran dan perilaku yang memotivasi kita untuk mengambil tindakan tertentu dan menolak tindakan lainnya. Orang sering

beranggapan bahwa ketika memiliki fakta yang sama, semua orang akan sampai pada suatu analisis yang sama. Kenyataannya tidaklah demikian. Kebulatan suara bahkan lebih mustahil dicapai jika kita mempertimbangkan bahwa selain perbedaan-perbedaan alami tersebut terdapat perbedaan-perbedaan yang disebabkan oleh berbagai dimensi, status, kekuasaan, kekayaan, usia, peranan menurut gender, keanggotaan dalam suatu kelompok sosial tertentu dan sebagainya. Perbedaan berbagai posisi berdasarkan indikator-indikator sosial tersebut mengakibatkan orang saling menginginkan hal-hal yang berbeda dalam situasi yang sama dan ketika sasaran dan kepentingan mereka tidak sesuai, maka terjadilah konflik.

Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam pembinaan dan pengawasan di daerahnya. Karena didalam undang-undang Penanganan Konflik Sosial Pasal 1 Nomor 7 tahun 2012 adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi Konflik yang mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pascakonflik. Undang-undang ini, dalam penanganan konflik harus mencerminkan asas kemanusiaan, hak asasi manusia, kebangsaan, kekeluargaan, mengacu pada bhineka tunggal ika, keadilan, kesetaraan gender, ketertiban, dan kepastian hukum. Juga mencerminkan keberlanjutan, kearifan lokal, tanggung jawab negara, partisipatif, tidak memihak, dan tidak membedakan.

Berdasarkan peraturan kepala BPN NO 3 tahun 2011 tentang pengelolaan pengkajian dan penanganan kasus pertanahan membedakan

dengan tegas batasan kasus, sengketa, perkara dan konflik pertanahan (meliputi kawasan perairan; udara; dan hutan). Kasus dibatasi sebagai sengketa, konflik, atau perkara pertanahan yang disampaikan kepada BPN RI untuk mendapatkan penanganan dan penyelesaian sesuai undang-undang nomor 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial yang tercantum dalam Pasal 3 Penanganan Konflik bertujuan: a. menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tenteram, damai, dan sejahtera; b. memelihara kondisi damai dan harmonis dalam hubungan sosial kemasyarakatan; c. meningkatkan tenggang rasa dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; d. memelihara keberlangsungan fungsi pemerintahan; e. melindungi jiwa, harta benda, serta sarana dan prasarana umum; f. memberikan perlindungan dan pemenuhan hak korban; dan g. memulihkan kondisi fisik dan mental masyarakat serta sarana dan prasarana umum.

Terdapat beberapa kasus konflik penggunaan lahan yang terjadi di Indonesia, seperti halnya yang terjadi di Kecamatan Maiwa, akhir-akhir ini dimana adanya konflik antara PTPN dengan warga sekitar dalam memperebutkan lahan yang masing-masing pihak mengklaim bahwa mereka memiliki hak atas tanah tersebut. Warga mencari keadilan melalui berbagai upaya, lewat Bupati Enrekang, DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), dan ke Komnas HAM (Hak Asasi Manusia) sekalipun. Namun, konflik tetap berkepanjangan, tak ada jalan keluar. Pembaruan HGU yang habis baru diajukan lagi oleh pihak PTPN Maroagins pada 2008. Namun, pemerintah Kabupaten Enrekang enggan memberikan perpanjangan izin HGU PTPN di

Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang. Dengan alasan, lahan ribuan hektar tersebut hanya di telantarakan PTPN, dan tidak memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Enrekang. Bahkan, pemerintah Kabupaten Enrekang mengeluarkan surat edaran Nomor 180/1657/setda, 2 juni 2016. Hal itu di tunjukan kepada Direksi PTPN yang berisi memberikan peringatan dan mempertegas bahwa HGU PTPN telah berakhir dan tidak diperpanjang lagi. PTPN yang masih tetap ingin menguasai lahan padahal masyarakat telah memampatkan lahan sesuai edaran Pemkab Enrekang yang membuat keresahan di tegah masyarakat. Selama ini PTPN selalu saja mengakibatkan kerusakan tanaman petani dan tidak ada kompensasi yang layak diberikan pada petani. Konflik yang terjadi menyebabkan bentrok antara Masyarakat dengan PTPN. Masyarakat juga melakukan unjuk rasa dan merobohkan papan Dislitbang (Dinas Penelitian dan Pengembangan) milik PTPN di Maiwa. Tidak hanya itu saja masyarakat juga melakukan aksi di jalan dengan membawa spanduk yang bertuliskan warga tolak penanaman kelapa sawit, Masyarakat yang melakukan aksi turun ke jalan tidak hanya warga Maiwa saja yang melakukan aksi tersebut tetapi semua Masyarakat yang ada di kawasan Kabupaten Enrekang pada umumnya. Pemerintah Kabupaten Enrekang pada saat itu juga sedang membahas rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Enrekang, dengan pasal kontroversial berupa perubahan kawasan pertanian menjadi kawasan kelapa sawit. Selain untuk kawasan kelapa sawit, PTPN juga mengokupasi tanah masyarakat untuk menampung air.

Karyawan PTPN unit maroagin di bantu 10 orang dari satuan Brimob Polda Sulsel melakukan perusakan terhadap kebun dan lahan. Di awal pembukaan perkebunan PTPN menguasai 5.320 hektar di Kecamatan yang akan ditanami kelapa sawit, dimana Sebahagian dari tanah tersebut adalah milik masyarakat. Masyarakat menuntut pembebasan lahan. Kekuasaan pemerintah sebagai penentu kebijakan, serta Hak Guna Usaha yang dimiliki PTPN dan hak Masyarakat yang merupakan warisan nenek moyang mereka, konflik ini sudah lama terjadi puluhan kali pertemuan digelar tak membuahkan hasil malahan konflik semakin membesar, dari bulan kebulan belum ada penyelesaian yang baik dari Pemerintah Kabupaten Enrekang. Perkebunan dan pengelolaan kelapa sawit yang dikelola oleh PTPN sebuah perkebunan sawit yang cukup luas, yang sebahagian besar sahamnya di miliki publik. Pada tahun 2022 terjadi konflik lagi antara Masyarakat dengan pihak PTPN dimana Masyarakat menuntut pengembalian lahan yang direbut paksa oleh Perusahaan PTPN. Yang dimana demonstrasi tersebut mereka meminta BPN meninjau ulang atau mencabut hak guna usaha (HGU) PTPN yang melanggar hak Rakyat.

Menurut Dahrendorf (2008) mengemukakan bahwa masyarakat mempunyai dua wajah (konflik dan *consensus*). Dahrendorf dengan teoritis konfliknya mengemukakan bahawa masyarakat disatukan oleh ketidakbebasan yang dipaksakan. Dengan demikian, posisi tertentu di dalamnya masyarakat mendegeglasikan kekuasaan dan otoritas terhadap posisi yang lain. Fakta kehidupan sosial ini mengarahkan Dahrendorf pada tesis sentralnya

bahwa perbedaan distribusi otoritas selalu menjadi faktor yang menentukan konflik sosial sistematis.

Berdasarkan beberapa fenomena-fenomena yang terjadi di Maiwa Kabupaten Enrekang terkait masalah konflik, maka sekiranya saya merasa punya andil untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang hal tersebut diatas. Oleh karna itu, peneliti untuk menganalisis **"Peran pemerintah daerah dalam penanganan konflik antara PTPN dan Masyarakat Maiwa di Kabupaten Enrekang"**.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana peran pemerintah dalam menangani konflik antara masyarakat dengan PT.PN XIV Unit Maroangin?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah dalam menangani konflik antara masyarakat dengan PT.PN XIV Unit Maroangin

D. Manfaat Penelitian

Skripsi ini bisa bermanfaat untuk kawan-kawan yang membacanya sebagai salah satu acuan untuk mengetahui tentang Konflik masyarakat dengan PT.PN XIV Unit Maroangin dan memberikan manfaat tersendiri bagi penulis di masa yang akan datang. Adapun kegunaan penelitian ini di lakukan yaitu sebagai berikut:

A. Teoritis Ilmiah

Secara teoritis hasil dari penulisan ini diharapkan dapat menjadi referensi, memberikan manfaat dan dapat berkontribusi dalam menambah

ilmu sosial pada umumnya dan ilmu politik pada khususnya tentang Peran Pemerintah dalam Konflik antara Masyarakat dengan PT.PN XIV Unit Maroangin yang akan diteliti oleh penulis.

B Praktis

1. Pemerintah

Diharapkan dapat menjadi acuan bagi para pemerintah agar bisa lebih memperhatikan dan menyelesaikan konflik masyarakat dengan PT.PN XIV Unit Maroangin yang dari dulu meresahkan Masyarakat.

2. Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat Memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai Konflik Masyarakat dengan PT.PN XIV Unit Maroangin di Kabupaten Enrekang.

3. Perusahaan

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pikiran yang bermanfaat serta memberikan informasi yang berguna bagi perusahaan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Risqi Husniyah	Solusi pemerintah daerah terhadap konflik sosial di desa taman asri kecamatan purbolingo dan desa raman aji kecamatan raman utara kabupaten lampung timur	metode penelitian yang digunakan yakni metode kualitatif deskriptif, jenis datanya data primer dan sekunder yang diperoleh dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Kemudian dianalisis, disajikan, serta divalidasi agar menjadi suatu penelitian ilmiah.	Hasil penelitian menunjukan, konflik sosial di Desa Taman Asri dan di Desa Raman Aji sama-sama disebabkan oleh faktor salah paham, pihak yang dirugikan, komunikasi yang tidak lancar, dan perbedaan antar-anggota masyarakat. Adapun perbedaannya terletak pada faktor penyebab konflik sosial di Desa Raman Aji, yang disebabkan juga oleh faktor pola kebudayaan dan perbedaan status sosial. Dampak akibat konflik sosial yang terjadi, yaitu kerugian secara materiil dan korban jiwa. Adapun solusi Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur, yaitu dengan memfasilitasi upaya perdamaian, bekerja sama dengan berbagai instansi dan Lembaga kemasyarakatan seperti FKUB,

				FKDM, FPK, dan memberikan santunan serta bantuan kepada pihak-pihak yang terkena dampak konflik. Solusi yang diberikan oleh pemerintah diketahui memang sudah tepat. Namun dalam praktiknya, solusi tidak dilaksanakan secara maksimal, sehingga faktor dan dampak akibat konflik sosial yang terjadi tidak dapat diatasi secara sepenuhnya.
2	Hendrik Risman	Upaya pemerintah daerah kabupaten kutai barat dalam menyelesaikan konflik tapal batas antar kampung di daerah kabupaten kutai barat (konflik Kampung Muhur dan Kampung Kaliq)	Penelitian ini dilaksanakan dengan cara mengumpulkan data, melalui penelitian kepustakaan, penelitian lapangan berupa Observasi, Wawancara dan penelitian dokumen, dengan narasumber yang ditentukan melalui teknik purposive sampling	Hasil Kabupaten Kutai Barat dalam hal ini Pemerintah penelitian ini menunjukkan bahwa, upaya Pemerintah kecamatan Siluq Ngurai dan Pemerintah Kabupaten melalui Tim PBD dalam menangani Konflik Tapal Batas antara kampung Muhur Dan Kampung Kaliq, Sang Sang adalah negosiasi, mediasi, fasilitasi. Adapun hambatan penyelesaian konflik tersebut adalah ketidak sabaran masyarakat, ego satu sama lain masih tinggi, belum

				memiliki data yang akurat dan susah diajak berdiskusi karena selalu salah anggapan terhadap pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui Upaya Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Dalam Menyelesaikan Konflik Tapal Batas Antara Kampung Di daerah Kabupaten Kutai Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini menunjukan bahwa, upaya Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dalam hal ini Pemerintah kecamatan Siluq Ngurai dan Pemerintah Kabupaten Timor Leste dalam menangani Konflik Tapal Batas antara kampung Muhur Dan Kampung Kaliq, Sang Sang adalah negosiasi, mediasi, fasilitasi. Dimana Posisi Pemerintah Kecamatan Siluq Ngurai dalam menangani konflik tapal batas antara Kampung Muhur dan Kampung Kaliq
--	--	--	--	---

				adalah netral tidak memihak pada salah satu kubu. Seharusnya Pemerintah kecamatan siluq ngurai harus melakukan mediasi, negosiasi, fasilitasi yang lebih serius dengan cara melibatkan memfasilitasi pemerintah kabupaten sepenuhnya dan dibantu oleh pemimpin informal dalam hal ini Kepala Adat yang memiliki pengaruh terhadap masyarakat untuk menekan pihak-pihak dalam hal ini masyarakat yang bersangkutan agar dapat bernegosiasi dan dipertemukan dalam proses mediasi.
3	Taufik Manji	Studi analisis peran pemerintah kota terhadap perkelahian antar kelompok di kota makassar	Penelitian ini dilakukan dengan metode yang dirancang atas dasar penelitian kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam dan observasi terhadap sejumlah informan yang ditetapkan secara relenasi profesionalitas.	Hasil penelitian memberikan simpulan bahwa (1) Terhadap keempat faktor penyebab perkelahian antara kelompok yang dikuasai peristiwanya oleh Pemerintah Kota Makassar, utamanya oleh manusia-manusia pemerintah yang berada dalam satua-satuan kerja perangkat kota yang

				relevan serta instansi terkait tidak diikuti dengan upaya peredaman yang tuntas secara professional serta terkoordinasi yang efektif dengan pusat pada tindakan peredaman pada inti penyebabnya seperti perebutan lahan, ketersinggungan nilai dan kepentingan karena kepadatan penduduk, kemiskinan yang sudah berlangsung secara struktural dan hampir menjadi kemiskinan kultural serta tata ruang yang tidak terkelola dengan baik baik isi maupun kebutuhannya. (2) Manusia pemerintahan sebagai pelaku dalam hubungan pemerintahan antara pemerintah dengan pihak yang diperintah dalam berbagai status khususnya mereka yang memiliki tanggung jawab yang relevan dengan peristiwa perkelahian antara kelompok, tidak antisipatif dan kreatif sehingga penyelesaian yang dilakukan hanya sampai pada tingkat proforma karena
--	--	--	--	---

				keterikatan pada deskripsi yang diemban serta selalu berada dalam jalur kepenegakkan prosedur bagi manusia pemerintah dengan atribut kepolisian dan dalam jalur kepentingan politik bagi manusia pemerintah dengan atribut para politisi yang mewakili partai politik pada lembaga legislatif (DPRD).
4	Hendra Lumi	Peranan pemerintah dalam pencegahan dan penanggulangan konflik antar kelompok (Suatu Study Di Kelurahan Teling Atas Kecamatan Wanea Kota Manado)	metode penelitian yang digunakan, yakni metode kualitatif deskriptif, jenis datanya data primer dan sekunder yang diperoleh dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Kemudian dianalisis, disajikan, serta divalidasi agar menjadi suatu penelitian yang ilmiah.	Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah kota bersama Pemerintah Kelurahan yang bertugas. Pemerintah kota Manado sebagai institusi yang berkuasa yang berada di kota ini seharusnya menyadari persoalan krusial ini, tugas pemerintah yang seharusnya memberikan jaminan keamanan bagi setiap warga negara seyogyanya diperankan dengan maksimal. Sebenarnya sampai dengan saat penelitian ini disusun pemerintah kota Manado sudah melakukan banyak upaya penanggulangan

				maraknya terjadinya kekerasan konflik antar kelompok warga atau yang dikenal dengan istilah "tarkam" (tawuran antar kampung/kelompok) Pembentukan tim reaksi siaga oleh pemerintah daerah dalam hal ini Pemerintah Kota Manado dari tahun 2010 hingga 2015 yang melibatkan beberapa unsur-unsur seperti Kepolisian, TNI, Kejaksaan, Kesbangpol, Dinas Sosial, beberapa stakeholder yang terkait didalamnya ternyata belum mampu meminimalisir dan melaksanakan tugasnya secara optimal dalam pencegahan dan penanggulangan konflik kekerasan perkelahian antar kelompok (Tarkam) yang kerap kali terjadi di Kota Manado, sehingga menimbulkan rasa tidak aman kecemasan dan ketakutan pada warga masyarakat. menciptakan keamanan dan ketertiban warga ternyata belum dapat
--	--	--	--	--

				menemukan solusi yang pas dalam menangani perkelahian antar kelompok.
--	--	--	--	---

B. Tinjaun Teoritis

1. Teori Konflik

Konflik merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Sebagai makhluk sosial, seseorang tidak bisa hidup tanpa manusia lain di sekitarnya sehingga dalam interaksinya seringkali menimbulkan persinggungan atau gesekan. Pemenuhan kebutuhan dasar manusia seringkali menimbulkan konflik karena setiap orang pasti menginginkan hajat hidupnya terpenuhi yang bisa saja menimbulkan kerugian pada orang lain sehingga konflik sulit di hindarkan. Sehingga dapat dikatakan bahwa konflik merupakan bagian dari kehidupan manusia mulai sejak dilahirkan sampai meninggal dunia. Karakteristik konflik terbagi atas dua :

A. Konflik Ekonomi

Konflik ekonomi adalah konflik yang berlangsung karena perebutan sumber-sumber ekonomi yang terbatas. Beberapa contoh seperti, a). Konflik masyarakat dan pemilik modal dalam soal sengketa tanah, antara perusahaan dan masyarakat. b). Konflik antara masyarakat dan pemerintah dalam kasus pertambangan emas, timah dan penggalian pasir. c). Konflik

antara masyarakat vs masyarakat dalam hal perebutan lahan. d). Konflik antara warga dan preman dalam soal perebutan lahan parkir.

Konflik merupakan pertentangan berbagai kepentingan yang sangat beragam, tidak hanya fokus pada soal ekonomi, tetapi juga ideologi, politik dan identitas. Untuk menghasilkan suatu perubahan yang maksimal, konflik diperlukan, sebagaimana dinyatakan Charles Tilly bahwa kekerasan kolektif melambangkan perjuangan untuk mendapatkan kekuasaan, dan bukan akibat dari kebobrokan sosial, kemelaratan materi atau tindakan tidak rasional, melainkan manifestasi rasionalitas dan peradaban menuju kemajuan.

Konflik dapat terjadi karena banyak sebab, seperti perbedaan nilai-nilai, kepentingan dan tujuan, serta persaingan untuk memenangkan sesuatu. Konflik dapat berupa segala bentuk interaksi yang bersifat bertentangan atau bersebrangan yang disebabkan oleh beberapa faktor dari dalam diri. Bentuk konflik dapat terjadi dari yang lunak hingga yang keras dan terbuka, yang sumbernya beragam dan pada umumnya merujuk pada dua dimensi yang meliputi dimensi fundamental (biasanya dipengaruhi aspek budaya dan ideologi, berhubungan dengan masalah identitas), dan dimensi instrumental (biasanya dipengaruhi aspek politik dan ekonomi, berhubungan dengan masalah instrumental dan maeril).

B. Konflik Sosial

Konflik sosial adalah konflik yang timbul karena masyarakat terdiri atas sejumlah kelompok sosial yang mempunyai karakteristik yang

berbeda, masyarakat yang tersusun dalam kelompok dan strata yang berbeda. Beberapa contoh seperti, a). Kemiskinan bisa memicu konflik sosial dengan pengelompokan warga yakni kelas atas, menengah dan bawah. b). Migrasi sosial bisa menimbulkan konflik, dari satu daerah ke daerah lainnya. c). Eklusifisme kelompok bisa melahirkan konflik dengan kelompok lain (kasus konflik salafit & WI di Mks 2002). d). Konflik antara pribumi dan non pribumi, dll. Collins memandang konflik merupakan sentra dalam kehidupan masyarakat, struktur sosial tidak terpisah dari aktor yang membentuknya, struktur sosial itulah yang menjadi sumbu interaksi sosial antara individu dan masyarakat. Rendall Collins menjadikan pendekatan struktur sosial sebagai inti teorinya, ia menyebut bahwa konflik hadir beberapa varian:

- Setiap individu hidup dalam kondisi subyektif yang dibangun sendiri.
- Adanya kekuasaan orang lain untuk mempengaruhi atau mengontrol pengalaman subyektif dari individu.
- Adanya kecenderungan dari individu untuk mengontrol orang yang berada atau yang menentang subyektifitas individu tersebut.

G. Simmel mengemukakan bahwa suatu konflik oleh para anggota yang terlibat konflik sebagai sesuatu yang memperjuangkan kepentingan individu, semakin cenderung konflik akan berlangsung secara keras. Konflik dapat dipahami sebagai sesuatu yang berakhir, semakin kurang kecenderungan konflik akan menjadi keras.

2. Konflik Sosial

Kebijakan Publik merupakan proses penggunaan kewenangan negara yang bereksperimen terhadap nasib orang banyak. Dari pemakaian tersebut, para ilmuwan cenderung melakukan simplifikasi terhadap teori kebijakan publik sehingga mengakibatkan permasalahan di level implementasi. Para ilmuwan telah banyak melakukan pemakaian terhadap kebijakan publik tersebut namun sebagian besar proses itu bias, ilmuwan justru dimanfaatkan sebagai instrumen bagi kenyamanan penguasa.

Kebijakan publik menitikberatkan pada apa yang Dewey katakan sebagai "publik dan problem-problemnya" kebijakan publik bahas soal bagaimana isu-isu dan persoalan-persoalan tersebut disusun (constructed) dan didefinisikan, dan bagaimana semuanya itu diletakkan dalam agenda kebijakan dan agenda politik. Selain itu, kebijakan publik merupakan studi tentang "Bagaimana, Mengapa dan apa efek dari tindakan aktif dan pasif pemerintah" Atau seperti yang dinyatakan oleh Dye, kebijakan publik adalah studi tentang "Apa yang dilakukan oleh pemerintah mengambil tindakan tersebut dan akibat dari tindakan tersebut". Studi "sifat sebab, dan akibat dari kebijakan publik" ini mengisyaratkan agar kita menghindari fokus yang sempit dan menggunakan pendekatan dan disiplin yang bervariasi.

Kebijakan Publik menurut Thomas Dye adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (public policy is whatever governments choose to do or not to do). Konsep tersebut sangat luas karena kebijakan

publik mencakup sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah disamping yang dilakukan oleh pemerintah ketika pemerintah menghadapi suatu masalah publik. Definisi lain mengenai kebijakan publik pun ditawarkan oleh Carl Friedrich yang mengatakan bahwa kebijakan adalah “serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai sesuatu yang dimaksud”

Kebijakan adalah salah satu aspek politik yang memiliki dampak luas pada masyarakat. Secara garis besar, kebijakan adalah ‘output-output’ dari proses politik, ia mencerminkan pengaruh pemerintahan pada masyarakat; yaitu kemampuannya untuk menghasilkan pemburukan-pemburukan. Bahkan sejak 1960-an dan 1970-an sebuah area studi yang khas telah berkembang, yaitu analisis politik. Studi dibentuk untuk mempelajari bagaimana kebijakan diprakarsai, dirumuskan dan diimplementasikan, dan bagaimana proses kebijakannya dapat dikembangkan pada level yang lebih dalam, analisis kebijakan mengkaji bagaimana dan mengapa keputusan-keputusan dibuat, sehingga dengan demikian proses kebijakan adalah serangkaian keputusan atau kumpulan keputusan yang saling terkait.

3. Konsep Peran pemerintah

A. Pengertian Peran Pemerintah

Setiap individu dalam masyarakat memiliki sumbangsih dalam sistem masyarakat setempat, individu tersebut kemudian membentuk sub-sistem sebagai pondasi dari sistem yang ada. Individu dalam masyarakat tentunya memiliki peran yang berbeda-beda antar satu sama lain tergantung dari tuntutan sistem yang memaksa individu tersebut bertindak dan menunjukkan peran. Dalam kehidupan manusia dan hubungannya dalam kelompok tertentu tertentu sering kali di barengi dengan tindakan interaksi yang berpola, baik resmi maupun yang tidak resmi. Sistem pola resmi yang dianut warga suatu masyarakat untuk berinteraksi dalam sosiologi dan antropologi di sebut pranata.

Menurut Koentjaraningrat (2003) menegaskan orang yang bertindak dalam pranata tersebut biasanya menganggap dirinya menempati suatu kedudukan sosial tertentu, tindakan tersebut dibentuk oleh norma-norma yang mengatur. Kedudukan (status) menjadi bagian penting dalam setiap upaya untuk menganalisa masyarakat. Tingkah laku seseorang yang memainkan suatu kedudukan tertentu itulah yang disebut peranan sosial. Sedangkan menurut Winarno (2007) bahwa presiden (Eksekutif), lembaga Yudikatif, lembaga Legislatif bahkan badan-badan administrasi mempunyai tugas masing-masing dalam penentuan kebijakan. Kebijakankebijakan yang diambil biasanya dapat meminimalisir masalah-masalah yang terjadi dan berkembang di masyarakat.

Peranan berarti tidak bisa dipisahkan dari kedudukan, eratnya kaitan bagi keduanya. Status tertentu akan membutuhkan peran tertentu, semakin berat peran yang dimainkan maka semakin tinggi pula statusnya dalam masyarakat. Dan sebaliknya bila semakin minim peran yang dilakukan maka semakin rendah pula kedudukan atau statusnya dalam masyarakat. Menurut Robert M.Z. Lawang (1985) peran diartikan sebagai suatu pola perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status atau posisi tertentu dalam organisasi. Peranan terkadang pula diikuti oleh tuntutan masyarakat yang telah memberikan kepercayaan kepada individu yang menempati status tertentu. Pengharapan masyarakat pada status tertentu langsung maupun tidak memberikan beban bagi pelaksana peran yang dimaksud. Menurut Sarwono, 2015, peran adalah sebuah teori yang digunakan dalam dunia Sosiologi, Psikologi dan Antropologi yang merupakan berbagai teori, orientasi maupun disiplin ilmu. Teori peran berbicara tentang istilah peran yang bisa digunakan dalam dunia teater, dimana seseorang aktor dalam teater harus bermain sebagai tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu. Posisi seorang aktor dalam teater dinalogikan dengan posisi seseorang dalam masyarakat, dan keduanya memiliki kesamaan posisi.

Peran diartikan pada karakterisasi yang di sandang untuk dibawakan oleh seseorang aktor dalam sebuah pentas drama, yang dalam konteks sosial peran diartikan sebagai suatu fungsi yang dibawakan seseorang

ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial. Peran seseorang aktor adalah batasan yang dirancang oleh aktor lain, yang kebetulan sama-sama berada dalam penampilan/ unjuk peran. Menurut Haris (2012) sebagai presepsi mengenal cara orang itu diharapkan berperilaku atau dengan kata lain adalah pemahaman atau kesadaran mengenai pola perilaku atau fungsi yang diharapkan diri orang tersebut.

1. Pemerintah

Pemerintah berasal dari kata perintah yang berarti menyuruh melakukan sesuatu, istilah pemerintah di artikan sebagai perbuatan dalam artian bahwa cara, hal urusan dan sebagainya dalam pemerintah.

Sedangkan definisi lain mengartikan bahwa pemerintah ialah jabatan atau aparatur dalam susunan politik (Muhammad Yamin 1982) pemerintah juga merupakan suatu bentuk organisasi yang bekerja dan menjalankan tugas untuk mengelolah sistem pemerintah dan menetapkan kebijakan dalam mencapai tujuan negara. Pemutusan hubungan kerja akan mengakibatkan konflik antara pekerja dan perusahaan apabila permasalahan pemutusan hubungan kerja tidak diselesaikan dengan kata sepakat dari kedua belah pihak. Peran pemerintah yang dimaksud oleh (Ariefgii, 2012) dalam pembinaan masyarakat antara lain:

- a. Pemerintah sebagai Regulator yaitu peran pemerintah adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembagunan melalui penerbitan perturan-peraturan. Sebagai

regulator, pemerintah memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur segala kegiatan pelaksanaan pemberdayaan.

- b. Pemerintah sebagai dinamisator adalah mengerakan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses pembangunan untuk mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah. Pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan secara intensif dan efektif kepada masyarakat. Biasanya pemberian bimbingan melalui tim penyuluh maupun badan tertentu untuk melakukan pelatihan.
- c. Pemerintah sebagai fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan untuk menjembatani berbagai kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan daerah. Sebagai fasilitator pemerintah bergerak dibidang pendampingan melalui pelatihan, pendidikan, dan peningkatan keterampilan, serta dibidang pendanaan atau permodalan melalui pemberian bantuan modal kepala masyarakat yang diberdayakan.

2. Peran Pemerintah

Peran pemerintah dalam mengelola sumber daya tanah tidak hanya melindungi fungsi dan nilai strategisnya bagi masyarakat, bahkan memberdayakan agar fungsi dan nilai tersebut menjadi sempurna penggunaanya dan pemanfaatanya sebagai mana yang diatur

dalam undang-undang dasar 1945 pasal 33 ayat 3 yaitu “ bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Pasal ini merupakan payung hukum tertinggi terhadap pengakuan hak-hak masyarakat dalam menggunakan berbagai sumber kekayaan yang ada di bumi, seperti hutan dan tanah atau lahan. Dan di atur lebih jelas lagi dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 tahun 1960 pasal 2 ayat memberikan wewenang yang lebih jelas tentang wewenang pemerintah yang menjalankan sebuah negara yaitu:

- a. Untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa.
- b. Menentukan dan mengatur hubungan antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa
- c. Mengatur dan menentukan hubungan hukum orang dan perbuatan hukum mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Persoalan sengketa tanah tak pernah redah khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan kabupaten Enrekang kecamatan Maiwa, masalah kasus sengketa tanah senantiasa terjadi dan menempati ranting tertinggi

C. Kerangka Fikir

Peran pemerintah menurut Munir bahwa dalam penyelesai suatu konflik maka peran pemerintah sangat dibutuhkan dengan melalui Mediasi,

Penanganan dan Verifikasi. Melalui Mediasi pengendalian konflik dengan cara mediasi dilakukan apabila kedua belah pihak yang berkonflik sepakat untuk menunjuk pihak ketiga sebagai mediator, Penanganan mengukur peran pemerintah dalam melakukan negosiasi dapat dilihat dari upaya-upaya yang dilakukan seperti mengindetifikasi permasalahan, mencari dan mengumpulkan informasi dari masing-masing yang berkonflik sedangkan Verifikasi Mengatur pemerintah dalam menverifikasikan data yang telah di analisis secara valid

Dalam penyelesaian konflik antara masyarakat dengan PT/Perusahaan Nusantara maka peran pemerintah di Kabupaten Enrekang melalui 3 hal di atas, agar kedua belah pihak yang berkonflik dapat teratasi dengan baik

Bagan Kerangka Fikir



D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini berangkat dari latar belakang masalah, kemudian dirumuskan dalam rumusan masalah dan dikaji berdasarkan teori dan tinjauan pustaka. Adapun fokus penelitian yang bersangkutan dari rumusan masalah adalah:

1. Peran pemerintah sebagai mediasi yaitu pemerintah melakukan penanganan sengketa lahan melalui proses perundingan atau mufakat tanpa memihak kepada kedua individu atau kelompok yang berkonflik dan bersikap netral
2. Peran pemerintah dalam Penanganan yaitu mencari dan mengumpulkan informasi dari masing-masing pihak yang berkonflik mendatangi pihak yang berkonflik dan mendengarkan tuntutan serta melakukan lobby terhadap masing-masing pihak yang berkonflik.
3. Peran pemerintah sebagai Verikasi yaitu mencari dan mengumpulkan informasi dari masing-masing pihak yang berkonflik mendatangi pihak yang berkonflik dan mendengarkan tuntutan serta melakukan lobby terhadap masing-masing pihak yang berkonflik.

E. Deskripsi Fokus Penelitian

Adapun deskripsi fokus penelitian yang dijelaskan oleh peneliti sebagai berikut:

1. Mediasi yaitu pemerintah dapat menangani konflik yang terjadi di lima desa Kecamatan Maiwa di Kabupaten Enrekang dengan cara

memediasikan agar permasalahan ini mencapai titik perdamaian kepada kedua belah pihak yang berkonflik

2. Penanganan yaitu pemerintah dapat memberikan tawaran kepada PTPN dengan masyarakat Maiwa untuk membagi rata tanah tersebut biar konflik ini akan selesai dan tidak ada lagi konflik yang berlanjut.
3. Verifikasi yaitu pemerintah dapat memberikan tawaran kepada PTPN dan masyarakat Maiwa untuk membagi rata tanah tersebut biar konflik ini akan selesai dan tidak ada lagi konflik yang berlanjut.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu yang akan di butuhkan peneliti yakni 2 bulan setelah ujian proposal di Kantor Kabupaten Enrekang, Kantor Kecamatan Maiwa, dan Lokasi PTPN di Kabupaten Enrekang. Di pilihnya lokasi ini karena beberapa pertimbangan di antaranya pertama, lokasi ini merupakan salah satu wilayah yang bermasalah terkait perebutan tanah oleh PTPN sebagai penanaman kelapa sawit di Kabupaten Enrekang hingga menuai penolakan bagi masyarakat tersebut, kedua lokasi penelitian berada di Kabupaten Enrekang Propinsi Sulawesi selatan (sebagai Pusat Pemerintah Daerah), sangatlah berpengaruh dan menjadi model bagi daerah-daerah lainnya di Propensi Sulawesi Selatan, ketiga lokasi tersebut merupakan tempat pemukiman masyarakat sehingga sangat sesuai dengan konflik vertikal

B. Jenis dan Tipe Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh kebenaran pengetahuan yang bersifat ilmiah, melalui prosedur yang telah ditetapkan.

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu sesuatu penelitian yang mendeskripsikan tentang ruang lingkup dan proses penanganan konflik antara PTPN dengan masyarakat di Maiwa Kabupaten Enrekang.

2. Tipe penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe studi kasus di maksudkan untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai masalah-masalah yang diteliti yang pernah dialami oleh informan berdasarkan pengalaman.

C. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah berbagai informasi dan keterangan yang diperoleh langsung dari sumbernya, yaitu para pihak yang dijadikan informan penelitian. Jenis data ini meliputi informasi dan keterangan mengenai konflik antara PTPN dengan masyarakat Maiwa.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah berbagai teori dan informasi yang diperoleh tidak langsung dari sumbernya, yaitu berbagai buku, artikel, internet atau jurnal ilmiah yang saling berkaitan dari objek yang diteliti sehingga peneliti lebih akurat.

D. Teknik Pengumpulan Data

Cara tersebut dapat dibagi atas tiga bagian, yakni melalui : observasi atau pengamatan, wawancara dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian mengenai Peran

Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Konflik Antara PT. Perkebunan Nusantara Dengan Masyarakat Maiwa Di Kabupaten Enrekang

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan penelitian untuk mendapat keterangan-keterangan biasa melalui percakapan dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan yang berkaitan Peran Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Konflik Antara PT. Perkebunan Nusantara Dengan Masyarakat Maiwa Di Kabupaten Enrekang

3. Dokumentasi

Dokumentasi, yaitu pencatatan dokumen dan data yang berhubungan dengan Peran Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Konflik Antara PT. Perkebunan Nusantara Dengan Masyarakat Maiwa Di Kabupaten Enrekang. Data ini berfungsi sebagai bukti dari hasil wawancara di atas. Kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh data yang diperlukan dengan menelusuri dan mempelajari dokumen-dokumen yang sudah ada. Studi dokumentasi dilakukan dengan mempelajari buku-buku dan hasil laporan lain yang ada kaitannya dengan Peran Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Konflik Antara PT. Perkebunan Nusantara Dengan Masyarakat Maiwa Di Kabupaten Enrekang.

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi,

dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.

Analisis deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, suatu peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang penelitian deskriptif memusatkan perhatian pada masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa melakukan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

Penelitian deskriptif sesuai karakteristiknya melakukan langkah-langkah tertentu dalam pelaksanaannya. Langkah-langkah ini sebagai berikut: Diawali dengan adanya masalah menentukan jenis informasi yang diperlukan, menentukan prosedur pengumpulan data melalui observasi atau pengamatan, pengelolaan informasi atau data, dan menarik kesimpulan penelitian.

Dalam teknik analisa data kualitatif pastinya hasil yang didapatkan nantinya belum di ketahui ini di karena sumber dan pengumpulan data yang di gunakan bermacam-macam. Analisis data kualitatif sifatnya induktif yang dimana data yang di peroleh nantinya bisa di kembangkan menjadi hipotesis. Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode analisa data di lapangan dengan mengambil model Miles dan Huberman dimana dalam analisa data

kualitatif ini di lakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus sampai dapat hasil yang tuntas sehingga datanya sudah jenuh.

Dalam metod analisa data dilihat dari model Miles dan Huberman ada 3 macam model yaitu:

A. Data reduction (Reduksi Data)

Dalam reduksi data berarti peneliti akan merangkum, memilih hal-hal pokok memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan di cari tema dan polanya. Tujuan dari reduksi data ini adalah agar peneliti mendapatkan gambaran yang lebih jelas agar bisa mempermudah dalam pengumpulan data selanjutnya. Peralatan yang di gunakan dalam reduksi data biasanya menggunakan peralatan elektronik seperti komputer mini dan memberikan kode terhadap aspek-aspek tertentu.

B. Data Display (Penyajian Data)

Setelah reduksi data, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data, dalam penyajian data kualitatif di lakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Biasanya yang sering digunakan dalam metode analisa penyajian data berupa bentuk teks yang sifatnya naratif. Tujuan dari penyajian data ini adalah agar memudahkan peneliti dalam memahami apa yang akan terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan yang telah di pahami.

C. Verifikasi

Verifikasi dalam metode analisa data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah kesimpulan awal yang sifatnya masih sementara, dan bisa saja akan berubah bila tidak ada bukti yang memperkuat atau mendukung pengumpulan data. Sehingga dalam verifikasi merupakan kesimpulan awal dari jawaban atau rumusan masalah peneliti. Kesimpulan dari penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya tidak pernah ada dimana di mana dianggap penglihatan yang masih buram yang di cari untuk mendapatkan penglihatan yang lebih jelas.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Enrekang

Sejak abad ke XII, Nama Enrekang mulai dikenal dengan sebutan Massenrempulu yang artinya meminggir gunung atau menyusur gunung (H.A.M Mappasanda, 1992:2). Sedang sebutan Enrekang dari Endeng yang artinya naik atau panjat dan dari sinilah asal mulanya sebutan Enrekang, daerah ini tersebut Massenrempulu yang artinya meminggir gunung atau menyusur gunung, sedangkan sebutan Enrekang dari Endeg yang artinya naik dari atau panjat dan dari sinilah asal mulanya sebutan Endekan. Masih ada arti versi lain yang dalam pengertian umum sampai saat ini bahkan dalam administrasi pemerintahan telah dikenal dengan nama ENREKANG versi Bugis sehingga jika dikatakan bahwa Daerah Kabupaten Enrekang adalah daerah pegunungan sudah mendekati kepastian, sebab jelas bahwa Kabupaten Enrekang terdiri dari gunung-gunung dan bukit-bukit sambung- menyambung mengambil 85% dari seluruh luas wilayah sekitar 1.786.01km

Pada mulanya Kabupaten Enrekang merupakan suatu kerajaan besar bernama maleppong bulan. Kerajaan ini bersifat manurung (terdiri dari kerajaan-kerajaan yang lebih kecil) Dengan sebuah federasi yang menggabungkan 7 Kerajaan. Pada mulanya Kabupaten Enrekang merupakan suatu kerajaan besar bernama kawasan/kerajaan yang lebih di kenal dengan federasi "pitu massenrempulu", yaitu:

1. Kerjaan Endekan yang dipimpin oleh arung/puang Endekan

2. Kerajaan kassa yang di pimpin oleh arung kassa
3. Kerajaan batulappa" yang dipimpin oleh Arung Batulappa
4. Kerajaan tallu batu papan (Duri) yang merupakan gabungan Dari Buntu Batu, Malua, Alla". Buntu Batu di pimpin oleh arung/puang Buntu Batu, Malua oleh arung/puang Malua, Alla oleh arung Alla
5. Kerajaan Maiwa yang dipimpin oleh arung Maiwa
6. Kerajaan letta" yang dipimpin oleh arung letta"
7. Kerajaan Baringin (Baringeng) yang di pimpin oleh arung baringin

Pitu (7) massenrempulu ini terjadi kira-kira dalam abad ke XVII M. pitu (7) massenrempulu berubah nama menjadi lima Massenrempulu karena kerajaan Baringin dan kerajaan Letta" tidak bergabung lagi kedalam federasi Massenrempulu. Akibat dari politik divide et impera, pemerintah belanda lalu memecah daerah ini dengan adanya surat keputusan dari pemerintah kerajaan belanda (korte verklaring), dimana kerajaan kassa dan kerajaan Batu Lappa" dimasukan ke Sawitto. Ini terjadi sekitar 1905 sehingga untuk tetap pada keadaan lima Massenrempulu tersebut, makanya kerajaan-kerajaan yang ada di dalamnya yang di pecah.

Beberapa bentuk pemerintahdi wilayah massenrempulu pada masa itu, yakni:

1. Kerajaan kerajaan di Massenrempulu pada zaman penjajahan belanda secara administrasi belanda berubah menjadi landshchap. Tiap landshchap dipimpin oleh seseorang arung (zelfbesteur) dan dibantu oleh sulewatang dan pabbicara/arung lili, tetapi kebijaksanaan tetap ditangan belanda

sebagai Kontrolleur. Federasi lima Massenrempulu" kemudian menjadi Buntu Batu, Malua, Alla" (Tallu Batu Papan/Duri), Enrekang (Endekan) dan Maiwa. Pada tahun 1912 sampai dengan 1941 berubah lagi menjadi onder afdeling Enrekang yang dikepalai oleh seseorang kontrolleur (tuan pettoro).

2. Pada zaman pendudukan Jepang (1941-1945), onder afdeling Enrekan berubah nama menjadi Kanrikang.
3. Dalam zaman NICA (NIT, 1946-27 Desember 1949), kawasan Massenrempulu kembali menjadi onder afdeling Enrekang.
4. Kemudian sejak tanggal 27 Desember 1949 sampai 1960, kawasan Massenrempulu kembali menjadi kewedanan Enrekang dengan puncak pimpinan pemerintah disebut kepalah pemerintahan negeri Enrekang (KPN Enrekang yang meliputi 5 (lima) SWAPRAJA yakni:
 - a) Swapraja Enrekang
 - b) Swapraja Alla
 - c) Swapraja Buntu Batu
 - d) Swapraja Malua
 - e) Swapraja Maiwa

B. Letak dan Kondisi Geografis

Kabupaten Enrekang secara geografis terletak antara 3014'36" – 3050'0" Lintang Selatan dan antara 119040'53" – 12006'33" Bujur Timur. Sedangkan ketinggiannya bervariasi antara 47 meter sampai 3.329 meter di atas permukaan laut.

Awal terbentuknya Kabupaten Enrekang hanya terdiri dari 9 kecamatan (Maiwa, Enrekang, Baraka, Anggeraja, Alla, Maiwa Atas, Enrekang Selatan, Alla Timur, Anggeraja Timur) kemudian pada tahun 2002 di mekarkan menjadi 12 kecamatan

Luas wilayah kabupaten ini adalah 1.786,01 km² atau sebesar 2,83 persen dari luas Provinsi Sulawesi Selatan. Wilayah ini terbagi menjadi 12 kecamatan dan secara keseluruhan terbagi lagi dalam satuan wilayah yang lebih kecil yaitu terdiri dari 129 wilayah desa/kelurahan. Luas masing-masing kecamatan yaitu Maiwa (392,87 Km²), Bungin (236,84 Km²), Enrekang (291,19 Km² , Cendana (91,01 Km²), Baraka (159,15 Km²), Buntu Batu (126,65 Km²), Anggeraja (125,34 Km²), Malua (40,36 Km²), Alla (34,66 Km²), Curio (178,51 Km²), Masalle (68,35 Km² dan Baroko (41,08 Km²).

Tabel 1
Kabupaten Enrekang berbatasan dengan wilayah-wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara	Kabupaten Tana Toraja
Sebelah Timur	Kabupaten Luwu
Sebelah Selatan	Kabupaten Sidrap
Sebelah Barat	Kabupaten Pinrang

Sumber : Badan pusat statistik Tahun 2021

C. Jumlah Penduduk Kabupaten Enrekang

Tabel 1.1

Jumlah Penduduk Kabupaten Enrekang Tahun 2021

No	Kabupaten Enrekang (Kecamatan)	Jumlah Penduduk (jiwa) Tahun 2021
1	Maiwa	28 221
2	Bungin	5602
3	Enrekang	37 554
4	Cendana	10004
5	Baraka	23 637
6	Buntu Batu	15 418
7	Anggeraja	28 790
8	Malua	9260
9	Alla	24 334
10	Curio	18 028
11	Masalle	14 769
12	Baroko	11 905
Kabupaten Enrekang		227520

Sumber: Enrekang dalam Angka 2021

Penduduk Kabupaten Enrekang pada tahun 2021 berjumlah 227520 orang dari 12 kecamatan. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari 12 kacamatan tersebut, kecamatan Maiwa adalah kecamatan yang memiliki jumlah penduduk Ke tiga terbanya di Kabupaten Enrekang yakni 28 221 dari 12 Kecamatan di Kabupaten Enrekang.

Tabel 1.2

Pembagia Luas Wilayah Kecamatan (Km²) Kabupaten Enrekang Sulawesi Selatan Tahun 2021

No	Kecamatan	Luas Area (Km²)
1	Maiwa	392,87
2	Bungin	236,84
3	Enrekang	291,19
4	Cendana	91,01
5	Baraka	159,15
6	Buntu Batu	126,65

7	Anggeraja	125,34
8	Malua	40,36
9	Alla	34,66
10	Curio	178,51
11	Masalle	68,35
12	Baroko	41,08
Enrekang		1 786,01 (Km²)

Sumber : Enrekang Regency in Figures 2022

Secara administrasi, kabupaten Enrekang Yang terbagi menjadi 12 kecamatan dengan luas wilayah 1 786 01 (Km²). Pada table diatas kita bisa lihat bahwa dari keseluruhan luas area masing-masing kecamatan, kecamatan Maiwa yang paling luas wilayahnya yakni 392,87 (Km²).

D. Gambaran Umum Kecamatan Maiwa

Kecamatan Maiwa merupakan salah satu dari 12 Kecamatan di kabupaten Enrekang, dengan luas wilayah 392,87 dalam kecamatan Maiwa terdapat 22 desa/kelurahan. Berikut wilayah di kecamatan Maiwa dalam bentuk table

Tabel 2
Desa/Kelurahan di Kecamatan Maiwa

No	Desa/Kelurahan	Status
1	Patondon Salu	Desa
2	Salo Dua	Desa
3	Mangkawani	Desa
4	Botto Mallangga	Desa
5	Batu Mila	Desa
6	Ongko	Desa
7	Bangkala	Kelurahan
8	Puncak Harapan	Desa
9	Tuncung	Desa
10	Lebani	Desa
11	Tapong	Desa
12	Baringin	Desa
13	Boiya	Desa
14	Matajang	Desa

15	Palakka	Desa
16	Pasang	Desa
17	Paladang	Desa
18	Limbuang	Desa
19	Kaluppang	Desa
20	Pariwang	Desa
21	Labuku	Desa
22	Tanete	Desa

Sumber : Kabupaten Enrekang Dalam Angka 2022

E. Sejarah Perusahaan

PT. Perkebunan Nusantara PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero) didirikan pada tanggal 11 Maret 1996 berdasarkan peraturan pemerintahan nomor 19 tahun 1996 tanggal 14 Februari 1996 tentang peleburan PT. Perkebunan XXVIII (Persero), PT. Perkebunan XXXII (Persero), PT Bina Mulya 36 Ternak (Persero) menjadi PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero) di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara.

PTPN XII suatu perusahaan yang bergerak di bidang pertanian atau perkebunan, terdapat beberapa anak perusahaan pada PTPN, salah satunya adalah PTPN XIV Unit Keera Maruangin yang dengan letak lokasi 3 35-3 50 lintang Selatan dan 120 10 – 120 20 Bujur Timur yaitu berada di Desa Motto Malagga Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang Sulawesi Selatan. Jarak lokasi proyek kurang lebih dari 263 km dari Kota Makassar.

PT.PN unit kebun Keera Maruangin mengelolah perkebunan kelapa sawit saat ini tanaman inti telah berstatus tanaman menghasilkan karena dari hasil studi kelayakan pada areal penanaman di anggap cocok untuk perkebunan kelapa sawit. Unsur iklim yang cukup mendukung dan keadaan

tanah yang menurut kelas kesesuaian lahan. Sebelum memperdayakan perkebunan kelapa sawit tentu saja dari perusahaan telah melalui uji kelayakan pada keadaan alam yang ada di Desa Motto Malangga Di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang.

1. Indetitas pemekarsa PT.PN Keera Maruangin

Identitas merupakan bentuk bukti yang nyata yang digunakan oleh seluruh pegawai perusahaan. Adapun contoh format indentitas perusahaan PT. Perkebunan Nusantara yaitu:

Nama Perusahaan	: PT.Perkebunan Nusantara XIV
Jenis Badan Hukum	: PT. (Perushan terbatas)
Alamat kantor	: Jln. Urip Sumoharjo
Nomor telepon	: 0411-444810,444112
Nomor fax	: 0411-444840, 449886
E-mail	: ptpnxiv@indosat.net.id
Status penanaman modal	: PMA
Bidang usaha	: Perusahaan Perkebunan

Adapun iklim PTPN XIV Unit kebun Maruangin sebagai berikut:

- a. Curah hujan Menurut sistem klasifikasi iklim yaitu tanpa musim kemarau yang nyata, bulan basah delapan bulan berturut-turut dan bulan kering 2 bulan. Curah hujan tahunan rata-rata 2.769 mm 155 hari hujan.
- b. Suhu Lokasi proyek rata-rata 26,8 C dengan suhu sehariian absolut bersekitar 20,6 – 31,3 C dengan lokasi proyek sesuai bagi pertumbuhan kelapa sawit.

- c. Lama penyinaran Lama penyinaran di lokasi proyek berkisar 24-71 % dengan rata-rata bulanan mencapai 47,9 % sedangkan lama penyinaran matahari yang optimum bagi pertumbuhan kelapa sawit adalah lebih besar dari 1.800 jam per tahun. Dengan demikian kondisi penyinaran matahari sesuai untuk pertumbuhan kelapa sawit.
- d. Kelembaban Kelembaban nisbi rata-rata berkisar 73-75% yang merupakan angka optimum yang cukup pertumbuhan tanaman dan sekaligus tanaman tidak terlalu rentan terhadap penyakit

Umunya jenis tanahnya lithick eutropepts dan typic eutropepts dengan bentuk wilayah bergelombang, tingkat kesuburanya rendah dengan kandungan bahan organik yang menurun menurut kedalamannya. Namun keadaan tanah secara umum menurut tingkat kesesuaian lahan dapat digunakan sampai pada tingkat produksi. Bila telah dilakukan perbaikan terhadap faktor pembatas tanah, terutama pemupukan, penambahan bahan organik, penanaman penutup tanah dan kondisi serangan hama dapat dikendalikan pada tingkat yang paling rendah, diperkirakan produksi dapat mencapai 80-95% dari potensi optimum.

2. Visi Misi PT.PN Keera Maruengin

Sebagai bada usaha yang bergerak di bidang pertanian dan perkebunan, PT. Perkebunan Unit Kebun Keera Maruengin memainkan peran strategis dalam pengembangan kawasan Utara Indonesia. Peran ini di formolisasikan dalam perusahaan yakni:

a. Visi:

Mewujudkan agribisnis dikawasan Utara Indonesia yang kompetitif, mandiri dan berkelanjutan sekaligus mampu memperdayakan ekonomi rakyat.

b. Misi

1. Mempelopori dan menggerakkan agribisnis agroindustri dikawasan Utara Indonesia
2. Meningkatkan kemampulabaan dan menghimpun dana sebagai modal pengembangan Perusahaan dan memberikan keuntungan bagi pegang saham dan stake holder
3. Mengembangkan kualitas sumber daya manusia
4. Membuka kesempatan kerja dan pengembangan perusahaan
5. Mengelola sumber yang dimiliki dan sumber daya lingkungan agar tetap lestari

PTPN di Enrekang dari kebun Maruengin Kecamatan Maiwa, lahan PTPN seluas 5.230 hektar. Ia berawal pada tahun 1973, lahan itu jadi bisnis ternak PT. Mulia Ternak. pada tahun 1996, jadi PTPN XIV. Penggabungan ini ikut mengubah haluan bisnis, dari ternak jadi perkebunan. Dalam pelaksanaan pengembaganya PTPN XIV Unit Keera Maruengin berencana akan melibatkan pekerja setidaknya akan membuka peluang kerja bagi 3.000 kepada keluarga. Namun menurut tahun 2014 jumlah tenaga kerja yang ada sekarang yaitu tenaga kerja langsung sekitar 1.500 orang dan tenaga kerja

tidak langsung sekitar 750 orang baik kariawan yang berasal dari dalam maupun dari luar daerah. Kehadiran PTPN di Kecamatan Maiwa belum diterima oleh masyarakat terutama di Desa Botto Mallangga Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang Sulawesi Selatan. Masyarakat Maiwa berusaha mencoba menghalagi proses perusakan lahan tersebut, namun tak dapat berbuat bayak karena dihalang-halangi oleh polisi. Pagar dan tanaman warga dirusak menggunakan chainsaw. Salah satu warga bercerita bahwa ketika mereka mempertanyakan perihal perusakan tanaman dan pagar kebun yang seluas 5,230 hektar, kepala unit PTPN XIV Maroangin, mengakui memerintahkan karyawanya mebersihkan lahan yang di klaim milik PTPN XIV.

Situasi saat itu sempat memanasi, warga berkumpul merspon aksi sepihak oleh perusahaan. Informasi yang beredar bahwa PTPN Unit Maroangin akan kembali melakukan proses pemberian lahan dan akan melakukan di areal persawahan milik masyarakat Maiwa.

F. Histori konflik

Konflik pada tahun 2018

Konflik pada tahun 2018 di Lima desa yang terdampak komlik dimana Mayarakat yang merasa tanahnya dirampas berkumpul di depan Kantor Bupati mereka sama-sama berunjuk rasa dan melawan petugas ke polisian dimana masyarakat melakukan demonstrasi dengan tuntutan mengembalikan hak mereka, sehingga pada demonstrasi tersebut kembali menelan luka-luka.

Berikut keterangan wawancara dengan informan tersebut:

“Pada tahun 2018 aliansi Masyarakat Masenrempulu (AMPU) di Kabuapten Enrekang melakukan demonstrasi dengan tuntutan agar lahan mereka dikembalikan mereka berkumpul di depan Kantor Bupati. Puluhan aparat ke polisian mengawasi setiap tindakan yang mereka lakukan, sehingga pada saat itu tiba-tiba aparat ke polisian menyerang mereka dan suasana menjadi mencekam dan terdengar beberapa kali suara tembakan yang di keluarkan oleh aparat ke polisian, ada beberapa warga Yang luka ringan karena menghindari pengejaran polisi.

Kekerasan yang dilakukan oleh ke polisian Enrekang seharusnya di proses dan ditindak lanjuti karna ini menyakut Hak Asasi Manusia (HAM) dan tugas ke polisian juga yaitu mengayomi masyarakat seharusnya mereka membela masyarakat yang sudah jelas di bodohi dan di rampas haknya.

Konflik individu dapat berubah menjadi konflik kelompok karena adanya kecendrungan individu untuk melibatkan setiap anggota kelompok. Solidaritas kelompok sering menjadi penyebab bagi kelompok untuk membela anggotanya meskipun tidak mengetahui penyebab timbulnya konflik. Konflik merupakan bagian dari demokrasi, karena ciri tatanan demokrasi adalah adanya peluang bagi kemerdekaan pemikiran consensus, dan perbedaan pendapat, serta partisipasi politik, manajemen konflik secara damai, dan pembatasan kekerasan, serta luasnya kepercayaan dan loyalitas terhadap pemerintah yang konstitusional dan demokrasi.

Ketika tanahnya dirampas masyarakat di Kecamatan Maiwa tidak bisa berbuat apa-apa karena mereka sebagian tidak punya hak ke pemilikan tanah. Warga yang di rampas tanahnya di tawari bekerja di PT.PN selama tujuh turunan dan mereka juga akan di beri tanah seluas delapan hektar menampung hewan untuk masyarkat Tamatto. Berikut pernyataanya

“Saya sudah lama tinggal di Bonto Malangga, saya sering melihat dan bahkan saya pernah dua kali turun aksi membantu dan membela masyarakat yang merasa tanahnya di rampas. Banyak masyarakat Maiwa yang tanahnya di rampas di janjikan akan di pekerjakan di PT.PN selama 7 turunan dan di berikan tanah seluas untuk menampung hewan mereka, tapi nyatanya mereka di bodohi sampai sekarang tidak ada tanah untuk menampung hewan dan mereka di pekerjakan hanya satu turunan saja”

Hasil wawancara dengan informan diatas menjelaskan bahwa permainan dan pengaruh PT.PN sangat luar biasa, masyarakat yang merasa tanahnya dirampas hanya melihat tanpa melawan karena mereka takut dan mereka juga ditawarkan pekerjaan dan di berikan tanah untuk menampung hewan mereka tapi ternyata itu hanya janji yang di buat oleh pihak PT.PN terhadap masyarakat yang tanahnya di rampas.

Coser berpandangan bahwa karakteristik konflik dapat dibedakan menjadi dua yaitu konflik nyata dan konflik tidak nyata. Konflik nyata ditimbulkan dari rasa frustasi karena tuntutan tertentu yang tidak sesuai dengan harapann yang ingin di capai oleh partisipasi. Adapun konflik tidak

nyata bukan disebabkan oleh tujuan-tujuan yang antagonis, melainkan kebutuhan untuk membebaskan ketegangan yang agresif dalam suatu interaksi. Dalam hal lain, pilihan yang berlawanan bergantung pada faktor yang menentukan dan tidak secara langsung berhubungan pada masalah yang diperdebatkan dan tidak berorientasi pada hasil yang ingin di capai secara spesifik



G. Penyerobotan lahan warga oleh PT.Perkebunan Nusantara

Penyerobotan lahan warga yang dilakukan oleh PTPN dengan melakukan tindak kekerasan, pengusuran lahan ternak warga yang di bantu oleh Brimob (Polisi). Tindak kekerasan yang dilakukan oleh PT.PN sampai masyarakat mengalami luka ringan, dimana sekelompok masyarakat yang melawan akan di pukul dan di penjarakan oleh Aparat Kepolisian

Konflik adalah suatu kenyataan hidup, tidak terhindarkan dan sering bersifat kreatif. Konflik dapat terjadi ketika tujuan masyarakat tidak lagi sejalan. Berbagai perbedaan pendapat dan konflik dapat diselesaikan tanpa kekerasan, dan sering menghasilkan situasi yang lebih baik bagi sebagian besar atau semua pihak yang terlibat. Karena itu konflik tetap berguna, apalagi karena memang merupakan bagian dari keberadaan kita. Konflik dapat timbul karena ketidakseimbangan antara hubungan-hubungan itu contohnya, kesenjangan status sosial, kurang meratanya kemakmuran dan akses yang tidak seimbang terhadap sumber daya, serta kekuasaan yang tidak seimbang yang kemudian menimbulkan masalah-masalah seperti deskriminasi, pengangguran, kemiskinan, penindasan, dan kejahatan

Penyebab terjadinya konflik antara masyarakat dengan PTPN berawal dari pemerintah memberikan HGU (Hak Guna Usaha) kepada PTPN seluas 350 hektar dengan kontrak per-25 tahun, ketika kontrak ini sudah berakhir maka pihak PTPN bermusyawarah kembali dengan Pemerintah Pusat apakah kontraknya akan diperpanjang, sebelum diperpanjang Hak Guna Usahanya

tentu ada hal yang harus di sepakati oleh pihak PTPN terkait dengan Peraturan Pemerintah Kehutanan ada beberapa syarat yang harus di penuhi atau di lakukan salah satunya adalah bahwa dari keseluruhan Hak Guna Usaha itu dikeluarkan 20% untuk masyarakat yang ada di sekitar PTPN

H. Tuntutan warga untuk mengembalikan lahannya

Masyarakat yang lahannya direbut paksa oleh PTPN sampai sekarang masih berjuang, melakukan demonstrasi menuntut pemerintah PTPN agar dapat mencabut hak guna usaha (HGU) PTPN, dimana perkebunan kelapa sawit dari tahun ketahun semakin meluas di Desa Motto Malagga dimana letak kantor dan pabrik pengelolaan kelapa sawit tersebut beroperasi. dimana masyarakat mengakui bahwa sebagian tanah tersebut adalah milik mereka. Ada beberapa desa yang tidak menyetujui adanya PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) yang beroperasi di Kecamatan Maiwa, berikut nama Desa yang berkesinambungan dan tidak menyepakati adanya PT. Perkebunan Nusantara:

- a. Desa Boto Malangga
- b. Desa Baringi
- c. Desa Batu Mila
- d. Desa Pantondon Salu
- e. Kelurahan Bangkala

Konflik merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Sebagai makhluk sosial, seseorang tidak bisa hidup tanpa manusia

lain di sekitarnya sehingga dalam interaksinya seringkali menimbulkan persinggungan atau pergesekan. Pemecuhan kebutuhan dasar manusia sering pula menimbulkan konflik karena setiap orang pasti menginginkan hajat hidupnya terpenuhi yang bisa saja menimbulkan kerugian pada orang lain sehingga konflik sulit di hindarkan. Sehingga dapat dikatakan bahwa konflik merupakan bagian dari kehidupan manusia mulai sejak dilahirkan sampai meninggal dunia.

Konflik dapat terjadi karena banyak sebab, seperti perbedaan nilai-nilai, kepentingan dan tujuan, serta persaingan untuk memenangkan sesuatu. Konflik dapat berupa segala bentuk interaksi yang bersifat bertentangan atau bersebrangan yang disebabkan oleh beberapa faktor dari dalam diri. Bentuk konflik dapat terjadi dari yang lunak hingga yang keras dan terbuka, yang sumbernya beragam dan pada umumnya merujuk pada dua dimensi yang meliputi dimensi fundamental (biasanya di pengaruhi aspek budaya dan ideologi, berhubungan dengan masalah identitas), dan dimensi instrumental (biasanya dipengaruhi aspek politik dan ekonomi, berhubungan dengan masalah instrumental dan materil) Menurut Paul Watzlawick, setiap sikap dan tindakan manusia merupakan penyampaian pesan dalam sebuah proses komunikasi, konflik akan senantiasa melemah atau bertambah kuat, dan hanya dapat diatasi dengan komunikasi itu sendiri. Dalam komunikasi kita dapat membedakan menjadi dua tingkatan, yaitu isi dan hubungan. Keduanya memberikan informasi yang dapat diinterpretasikan. Untuk dapat menilai

komunikasi dan situasi konflik, dibutuhkan sebuah analisa (analisa transaksi dan analisa perasaan harga diri).

Perusahaan kelapa sawit ini mulai beroperasi di Sulawesi Selatan sejak tahun 2006 di wilayah Kabupaten Enrekang. Areal perkebunan dan pabrik kelapa sawit yang berada di desa Moto Malangga Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang. Selama ini, PTPN mengelola kebun kelapa sawit di Kecamatan Maiwa. Konflik masyarakat dengan PTPN menjadi pusat perhatian di Kabupaten Enrekang, keluhan masyarakat yang tanahnya di rampas dan 5 orang pekerja di PT.PN yang di PHK secara sepihak masih di proses sampai sekarang.

I. Peran pemerintah sebagai mediasi dalam penanganan konflik antara PT.Perkebunan Nusantara dan masyarakat Maiwa di Kabupaten Enrekang

Dalam meredam dan menyelesaikan gejolak yang berpotensi terhadap terjadinya konflik, pemerintah menggunakan cara yang sering digunakan dalam penyelesaian konflik yaitu dengan melakukan mediasi.

Cara ini lazim digunakan baik ditingkat lokal nasional maupun dunia internasional dalam resolusi konflik. Peran pemerintah daerah dalam melakukan mediasi atau sebagai mediator dapat dilihat dari upaya mempertemukan kedua belah pihak antara PTPN dan Masyarakat Maiwa dimana mereka bisa menyampaikan keluhan dan tuntutan mereka secara langsung. Menggali informasi sebanyak banyaknya dari masing-masing pihak dalam

pertemuan , mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan masing-masing pihak mengetahui perbedaan-perbedaan dalam pertemuan, mencari kata sepakat dalam pertemuan mencari kata sepakat dalam pertemuan baik lisan maupun tulisan dan menyusun rencana tindak lanjut dari hasil yang dicapai, termasuk agenda pertemuan berikutnya.

Untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di Enam Desa di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang pemerintah melakukan mediasi agar permasalahan ini mencapai titik perdamaian dinas kehutanan Kabupaten Enrekang memanggil para pihak kelompok yang mendiami di kawasan kelapa sawit tersebut. Alasannya agar permasalahan tersebut bisa diketahui apa penyebab dari konflik yang sudah terjadi serta mencari solusi sebagaimana kelompok bisa bekerja dan bisa memenuhi kebutuhan baik itu PTPN maupun masyarakat itu sendiri sehingga tidak terjadi konflik yang begitu sangat serius.

Berdasarkan literasi menunjukan peran pemerintah daerah merupakan peranan bawaan sebagaimana dijelaskan pada subbab sebelumnya . dalam hal ini pemerintah daerah memiliki kewajiban yang harus dilakukan dalam memberikan fasilitasi kementrian kehutanan antara masyarakat setempat dengan pegelolah kelapa sawit. peran pemerintah daerah Kabupaten Enrekang dalam melakukan fasilitasi atau sebagai fasilitator dapat dilihat dari penyediaan sarana pertemuan (lokasi, tempat dan fasilitas) menetapkan waktu dan agenda pertemuan serta memfasilitasi pertemuan untuk mencapai kesepakatan (sebagai fasilitator) Pengendalian konflik dengan cara mediasi

dilakukan apabila kedua pihak yang berkonflik ketika pemerintah memberikan pemikiran atau nasihat nasihatnya tentang cara terbaik menyelesaikan pertentangan mereka. Namun cara pengendalian ini kadang-kadang menghasilkan penyelesaian yang cukup efektif. Cara seperti ini efektif mengurangi irasional yang biasanya timbul didalam konflik. Dengan cara seperti ini pula memungkinkan pihak-pihak yang berkonflik akan menarik diri tanpa harus “kehilangan muka”. Peran pemerintah sudah berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, yaitu sebagai orang pertama dalam mengambil kebijaksanaan. Dalam hal ini pemerintah memiliki peran sebagai Mediator untuk menjadi penengah yang netral dalam konflik antara PTPN dan masyarakat sedikit demi sedikit dengan memperivikasi dan mengembalikan lahan masyarakat. Meskipun penganan dari pemerintah sudah bersikap netral, tanpa membeda-bedakan satu sama lainnya. Melakukan mediasi, memfasilitasi dan mempertemukan dua belah pihak yang berkonflik.

Pemerintah sebagai penengah dari konflik masyarakat dan PTPN seharusnya melakukan pendekatan baik kepada masyarakat maupun Perusahaan, peran pemerintah sangatlah penting dalam mencegah atau mengatasi konflik yang sudah belarut-larut. Kunci utama dalam penyelesaian konflik adalah komunikasi, dengan melakukan komunikasi yang tepat diharapkan juga mendapat solusi dan jalan terbaik. Dalam hal ini pemerintah berperan sebagai penengah antara perusahaan dan masyarakat, pemerintah harus adil tidak boleh memihak ke salah satu kelompok, yang menjadi penyelesaian konflik tersebut

adalah pemerintah yang benar-benar mengambil sikap antar kedua belah pihak. Peran pemerintah sangatlah penting dalam mengatasi konflik, sebagaimana pemerintah melindungi rakyatnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta bersikap adil dan melakukan pemecahan masalah terhadap sumber konflik yang terjadi.

Konflik masyarakat dengan PTPN menjadi pusat perhatian di Kabupaten Enrekang Kecamatan Maiwa, keluhan masyarakat yang tanahnya di rampas dan 120 orang bekerja PTPN yang di PHK secara sepihak masih dalam proses sampai sekarang. Pemerintah Kabupaten Enrekang sudah puluhan kali melakukan mediasi mempertemukan kedua belah pihak yang berkonflik.

Konflik dapat terjadi ketika tujuan masyarakat tidak lagi sejalan. Berbagai perbedaan pendapat dan konflik dapat diselesaikan tanpa kekerasan, dan saling menghasilkan situasi yang lebih baik, bagi sebagian besar atau semua pihak yang terlibat, karena konflik itu tetap berguna, apalagi karena memang merupakan bagian dari keberadaan kita. Konflik dapat timbul karena ketidak seimbangan antara hubungan- hubungan itu contohnya, kesenjangan status sosial, kurang meratanya kemakmuran dan akses yang tidak seimbang terhadap sumber daya serta kekuasaan yang tidak seimbang yang kemudian menimbulkan masalah- masalah seperti diskriminasi, pengangguran, kemiskinan, penindasan, kejahatan.

a. Cara Pemerintah Memediasi Konflik antara PTPN dan Masyarakat

Berikut hasil wawancara dengan Asma.SE selaku Wakil Bupati informan

yang membahas tentang indikator dengan cara pemerintah memediasi antara lain:

“pada tahun 2018 ada 6 Kecamatan yang melakukan demonstrasi dengan tuntutan yang sama terhadap perusahaan PTPN yang menduduki perkebunan kelapa sawit di Lima desa Kecamatan Maiwa. Ratusan aparat kepolisian dan brimob mengawasi setiap tindakan yang mereka lakukan, sehingga pada saat itu tiba-tiba aparat kepolisian dan brimob menyerang mereka dan suasana menjadi mencekam dan terdengar beberapa suara tembakan sebagai peringatan, tapi masyarakat masih ngotot untuk mempertahankan kan tapi alhamdulillah belum ada jatuh korban dalam konflik tersebut (wawancara dengan As pada tanggal 23 Februari 2022)”

Berdasarkan hasil wawancara dari Wakil Bupati selaku informan yang membahas tentang cara pemerintah memediasi konflik karna masyarakat masih tidak setuju jika PTPN masih beroperasi karna tidak memiliki izin atau tidak memiliki HGU (hak guna usaha) itu semuanya akan merugikan masyarakat yang merusak lingkungan dan tanaman yang menjadi sumber pendapatan warga setempat.

Hal senada juga yang diungkapkan oleh Rahmawati selaku Koordinator Aksi sengketa pembebasan lahan berikut hasil wawancara penulis dengan informan

“sampai sekarang konflik lahan ini tentunya masih di proses, kami selalu melakukan mediasi memepertemukan kedua belah pihak yang

berkonflik dan akan melakukan verifikasi lahan kembali. Tentunya pemerintah sekarang akan kembali melakukan verifikasi lahan, kami akan membantu masyarakat dan berjanji akan mengembalikan lahan mereka secara adil dan merata. (wawancara dengan RA Pada tanggal 15 Maret 2022)”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ramawati diketahui bahwa konflik lahan ini masih di proses untuk selalu melakukan mediasi memepertemukan kedua belah pihak yang berkonflik agar tidak ada lagi kericuan yang berkelanjutan.

Berikut hasil wawancara dengan bapak Nurjannah Mandeha selaku informan yang membahas tentang cara pemerintah memediasi konflik antara PTPN dengan masyarakat yang menjadi salah satu indikator tentang peran pemerintah dalam penanganan konflik antara PTPN dengan masyarakat Maiwa Kabupaten Enrekang.

“Untuk menangani masalah konflik tersebut, kita melakukan dengan cara Mediasi. Ketika memediasi kedua belah pihak mengadakan pertemuan secara musyawara untuk membahas permasalahan tentang konflik Agraria. Dalam konflik ini pemerintah dibantu oleh tokoh masyarakat, beserta pihak kepolisian. Selain mediasi, kita juga melakukan negosiasi dan memfasilitasi. Segala cara kita lakukan, agar daerah kita ini kembali aman seperti dahulu kembali”. (wawancara dengan N.M Tanggal 29 Februari 2022)

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak N.M yang membahas tentang cara pemerintah memediasi konflik antara PTPN dengan masyarakat yang menjadi salah satu indikator dari peran pemerintah dalam penanganan konflik tersebut, ketika memediasi kedua belah pihak dengan cara melakukan musyawara untuk membahas masalah konflik agraria yang masih dalam proses,

Berikut hasil wawancara dengan bapak Ahmad Yusuf selaku informan yang membahas tentang peran pemerintah sebagai mediasi dalam penanganan konflik antara PT.Perkebunan Nusantara dengan masyarakat Maiwa di Kabupaten Enrekang.

"kita memediasi antara kedua kelompok dan mempertemukan sehingga dapat kita bicarakan dengan baik-baik apa permasalahan dengan cara musyawarah.(wawancara dengan bapak A.Y Pada tanggal 20 Maret 2022)"

Berdasarkan wawancara diatas dengan informan yang membahas tentang peran pemerintah memediasi dalam penanganan konflik antara PTPN dengan masyarakat Maiwa di Kabupaten Enrekang penulis dapat menyimpulkan bahwa pemerintah benar benar melakukan mediasi untuk mencari tau kejelasan dari kedua belah pihak yang tetap mempertahankan haknya masing-masing, dimana wilayah tersebut bukanlah wilayah yang seharusnya mereka berada. Penulis pikir ini merupakan langkah yang tepat yang dilakukan oleh pemerintah dalam menangani masalah tersebut Hasil analisis dari jawaban

keempat informan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Cara Pemerintah Memediasi Konflik antara PTPN dengan Masyarakat yaitu dengan cara melakukan mediasi mempertemukan kedua belah pihak untuk membicarakan tentang konflik yang ada serta menghadirkan tokoh masyarakat dan pihak kepolisian untuk mengantisipasi sesuatu hal yang tidak diinginkan.

b. Upaya Yang Dilakukan Pemerintah untuk memediasi konflik PTPN Dengan Masyarakat

Berikut hasil wawancara di ungkapkan oleh Bapak Asman salah satu informan yang membahas tentang indikator upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memediasi konflik PTPN dengan masyarakat di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang

“Kita memediasi para pelaku konflik, kita pertemuan, kita bicara baik baik, apa permasalahan sebenarnya dengan cara musyawarah di bantu dengan pemerintah desa, tokoh masyarakat, dari pemerintah Kecamatan, Kabupaten serta” (hasil wawancara dengan As wawancara tanggal 23 Februari 2022)

Berdasarkan hasil wawancara dari Bapak Asman selaku informan yang membahas tentang upaya yang dilakukan pemerintah untuk memediasi konflik PTPN dengan masyarakat dalam peran pemerintah Daerah dalam penanganan konflik antara PTPN dengan masyarakat Maiwa Kabupaten Enrekang dapat diketahui bahwa kita memediasi para pelaku konflik, kita memepertemuan kemudian kita bicarakan baik-baik dan mencari jalan keluar agar masyarakat dan PTPN dapat mejadi lebih baik.

Berikut hasil wawancara dengan Rahmawaselaku informan yang membahas tentang upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mmediasi konflik PTPN dengan masyarakat dalam peran pemerintah dalam penanganan konflik antara PTPN dengan masyarakat Maiwa Kabupaten Enrekang

“pemerintah melakukan beberapa upaya untuk menangani konflik ini salah satunya dengan cara mempertemukan kedua belah pihak (tatap muka) demi membicarakan perseteruan ini guna untuk menemukan solusi serta saran yang di berikan kepada kedua pihak agar konflik ini tidak berkepanjangan” (Hasil wawancara dengan RA tanggal 15 Maret 2022)

Berdasarkan hasil wawancara dari RA selaku informan yang membahas tentang indikator peran pemerintah dalam penanganan konflik antara PTPN dengan masyarakat Maiwa di Kabupaten Enrekang dengan cara mempertemukan kedua belah pihak untuk membicarakan perseteruan ini guna menemukan solusi serta saran yang diberikan kedua belah pihak agar konflik tidak berkepanjangan.

Berikut hasil wawancara dari N.M selaku informan yang membahas tentang indikator upaya yang dilakukan pemerintah untuk memediasi konflik PTPN dengan masyarakat dalam peran pemerintah dalam penanganan konflik antara PTPN dengan masyarakat Maiwa di Kabupaten Enrekang

“peran pemerintah dalam menanggapi konflik ini memang sangat dibutuhkan, karena setiap pertemuan jarang sekali tidak adu mulut dari kedua belah pihak maka dari itu pemerintah sering memberikan

saran dimana saran tersebut tidak menyudutkan salah satu pihak”
(wawancara dengan bapak N.M tanggal 29 Februari 2022)

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak N.M selaku informan yang membahas tentang upaya yang dilakukan pemerintah untuk memediasi konflik PTPN dengan masyarakat dalam menanggapi konflik peran pemerintah sangat dibutuhkan, karena setiap pertemuan jarang sekali adu mulut dari kedua belah pihak maka pemerintah dapattah menjadi peranan yaitu memberikan sebuah solusi atau saran agar PTPN dengan masyarakat bisa menjadi lebih tenang.

Ketiga narasumber di atas maka dapat di simpulkan bahwa upaya yang dilakukan pemerintah dalam menanggapi konflik di atas yaitu dengan cara sering mempertemukan kedua belah pihak (tatap muka) guna untuk mempertanyakan sebab- sebab konflik ini dan pemerintah selalu memberikan solusi dimana solusi tersebut tidak menyudutkan salah satu pihak (Netral)

c. Kendala yang dihadapi pemerintah dalam memediasi konflik PTPN dan Masyarakat

Berikut hasil wawancara dengan Bapak As selaku informan yang membahas tentang indikator kendala yang dihadapi pemerintah dalam memediasi konflik PTPN dan masyarakat dalam peran pemerintah dalam penanganan konflik antara PTPN dengan masyarakat Maiwa di Kabupaten Enrekang

“hal-hal yang sering menjadi penghambat ketika pemerintah ingin memepertemukan kedua belah pihak yaitu sering adanya salah satu pihak tidak hadir dalam pertemuan atau musyawara baik dari PTPN

maupun Pihak masyarakat yang bersangkutan” (Hasil wawancara dengan As Tanggal 23 Februari 2022)

Berdasarkan hasil wawancara yang di ungkapkan oleh bapak As selaku informan yang membahas tentang indikator tentang peran pemerintah dalam penanganan konflik antara PTPN dengan masyarakat Maiwa di Kabupaten Enrekang dapat diketahui bahwa pemerintah ingin memepertemukan kedua belah pihak yaitu sering adanya salah satu pihak tidak hadir dalam pertemuan atau musyawarah baik dari PTPN maupun pihak masyarakat yang bersangkutan

Berikut hasil wawancara dengan RA selaku informan yang membahas tentang indikator kendala yang dihadapi pemerintah dalam memediasi konflik PTPN dan masyarakat dalam peran pemerintah dalam penanganan konflik antara PTPN dengan masyarakat Maiwa di Kabupaten Enrekang

” pemerintah memang sering mempertemukan kedua belah pihak, tapi yang jadi kendala rencana itu hanya sekedar rencana karena baik dari PTPN maupun Masyarakat kadang tidak hadir dalam pertemuan dengan alasan sibuk atau ada kerjaan lain apalagi mayoritas masyarakat Maiwa pekerjaannya adalah petani”.(Hasil wawancara dengan RA tanggal 15 Februari 2022)

Berdasarkan hasil wawancara dengan RA selaku informan yang membahas tentang indikator upaya yang dihadapi pemerintah dalam memediasi konflik PTPN dengan masyarakat dalam peran pemerintah dalam penanganan konflik antara PTPN dengan masyarakat Maiwa di Kabupaten Enrekang, pemerintah

memang sering memepertemukan kedua belah pihak tapi yang jadi masalah rencana itu hanya sekedar rencana baik dari PTPN maupun masyarakat karna mereka pada sibuk apalagi masyarakat itu sendiri mayoritasnya adalah petani.

Berikut hasil wawancara dengan bapak N.M selaku informan yang membahas tentang indikator kendala yang dihadapi pemerintah dalam memediasi konflik PTPN dan masyarakat dalam peran pemerintah dalam penanganan konflik antara PTPN dengan masyarakat Maiwa di Kabupaten Enrekang

“sebenarnya pemerintah sudah melakukan peranya akan tetapi yang jadi sumber permasalahan yaitu dari kedua belah pihak yang kadang acuh tak acuh untuk menyelesaikan permasalahan ini, meskipun pemerintah sudah bersikeras untuk menyampaikan pertemuan kedua belah pihak” (Hasil wawancara N.M tanggal 29 Februari 2022)

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak N.M selaku informan yang membahas tentang indikator upaya yang dihadapi pemerintah dalam memediasi konflik PTPN dengan masyarakat dalam peran pemerintah dalam penanganan konflik antara PTPN dengan masyarakat Maiwa di Kabupaten Enrekang, pemerintah sebenarnya sudah menjalankan tugasnya dalam cara memediasi kedua yang konflik tersebut tetapi mereka yang berkonflik acuh tak acuh menyelesaikan permasalahan karna mereka ingin menguasai sepenuhnya

Berdasarkan hasil wawancara dari ketiga narasumber di atas maka dapat disimpulkan bahwa kendala yang dihadapi pemerintah dalam memediasi konflik PTPN dan Masyarakat yaitu kurangnya kesadaran dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara ini bahkan dari sisi lain mereka mementingkan diri sendiri dari pada perkara yang sudah berlarut-larut.

J. Peran pemerintah dalam Penanganan konflik antara PT.Perkebunan Nusantara dan masyarakat Maiwa di Kabupaten Enrekang

Penanganan merupakan proses membangun kebenaran, akurasi, atau validitnya sesuatu. Penanganan juga bisa diartikan sebagai perbandingan dua atau lebih item, atau penggunaan tes tambahan, untuk memastikan keakuratan, kebenaran, atau kebenaran informasi yang baik dalam penanganan konflik. Berdasarkan teori tersebut saya melihat pemerintah daerah Kabupaten Enrekang memberikan Penanganan terhadap PTPN dan masyarakat Maiwa. Pemerintah menyarankan agar kedua belah pihak menyelesaikan masalah tersebut agar tidak terjadi yang lebih buruk lagi.

Untuk mengukur peranan pemerintah dalam melakukan penanganan dapat dilihat dari upaya-upaya yang dilakukan seperti mengidentifikasi permasalahan, mencari dan mengumpulkan informasi dari masing-masing pihak yang berkonflik, mendatangi pihak-pihak yang berkonflik dan mendengarkan tuntutan serta melakukan lobby terhadap masing-masing pihak untuk menyatukan perbedaan.

Cara Pemerintah dalam Penanganan Konflik antara PTPN dan Masyarakat

Berikut hasil wawancara yang dengan wakil bupati Asman selaku informan dengan cara Penanganan yang membahas tentang peran pemerintah mengenai konflik antara PTPN dan masyarakat Maiwa di Kabupaten Enrekang

"ini merupakan langkah akhir yang kami lakukan apabila Mediasi terbilang gagal. Maka kami akan melakukan negosiasi kepada kedua belah pihak pelaku konflik". (wawancara dengan As pada tanggal 23 Februari 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak As selaku informan yang membahas tentang indikator Tesebut dalam peran pemerintah dalam menangani konflik antara PTPN dan masyarakat Maiwa di Kabupaten Enrekang kemudian ini adalah langkah terakhir bagi pemerintah untuk melakukan negosiasi kepada PTPN dgn masyarakat Maiwa agar tidak ada lagi konflik

Berikut hasil wawancara yang di ungkapkan Rahmawati selaku informan dengan cara Penanganan yang membahas tentang peran pemerintah dalam menangani konflik antara PTPN dan masyarakat Maiwa di Kabupaten Enrekang.

"Pemerintah meminta kedua belah pihak melalui sebuah surat untuk hadir dalam penyelesaian konflik antara PTPN dan Masyarakat Maiwa tersebut. Pemerintah Daerah mengundang kedua belah pihak baik itu dari pihak PTPN dan pihak dari Masyarakat Maiwa untuk

hadir dalam musyawarah yang difasilitasi oleh Pemerintah. Dan memberikan tawaran yaitu negosiasi kemudian mengetahui sebab dari awal persoalan yang terjadi.” (Hasil wawancara dengan RA tanggal 15 Maret 2022)

Berdasarkan hasil wawancara yang di ungkapkan Rahmawati selaku informan yang membahas tentang indikator Penanganan adalah pemerintah menangani konflik antara PTPN dan masyarakat Marwa di Kabupaten Enrekang, pemerintah Enrekang membuat surat edaran untuk kedua belah pihak yang berkonflik untuk bisa hadir dalam penyelesaian konflik, pemerintah memberikan tawaran yaitu negosiasi dan ingin mengetahui apa penyebab sehingga terjadi konflik.

Senada yang di sampaikan oleh A.Y pengawas lapangan PT.PN selaku informan dalam indikator Penanganan dalam hal ini peran pemerintah dalam menangani konflik antara PTPN dan Masyarakat

Berikut hasil wawancara dengan A.Y selaku informal

“Direksi PTPN telah menerima surat untuk menghadiri dan membahas konflik yang berkepanjangan ini guna untuk mencari solusi agar kedua belah pihak tidak berkonflik lagi”. (wawancara dengan bapak A.Y Pada tanggal 20 Maret 2022)”

Berdasarkan hasil wawancara yang di ungkapkan oleh A.Y selaku informan yang menjadi indikator Penanganan dalam peran pemerintah

menangani konflik antara PTPN dan masyarakat Maiwa di Kabupaten Enrekang, Pihak dari PTPN telah menerima surat dan menghadiri pertemuan yang di fasilitasi oleh pemerintah Kabupaten Enrekang.

Berikut hasil wawancara yang di ungkapkan bapak N.M selaku informan dengan cara Penanganan yang membahas tentang peran pemerintah dalam menangani konflik antara PTPN dan masyarakat Maiwa di Kabupaten Enrekang.

"pemerintah dalam menanggapi melakukan negosiasi kepada kedua belah pihak melalui persuratan maupun pendekatan secara personal, selain itu kadang kedua metode itu gagal dikarenakan tidak ada respon dari pihak PTPN maupun Masyarakat Maiwa" (wawancara dengan bapak N.M tanggal 29 Februari 2022)

Berdasarkan hasil wawancara yang di ungkapkan oleh bapak N.M selaku informan yang menjadi indikator Penanganan dalam peran pemerintah menangani konflik antara PTPN dan masyarakat Maiwa di Kabupaten Enrekang, pemerintah menanggapi melakukan negosiasi kepada kedua belah pihak melalui persuratan maupun pendekatan secara personal tetapi kadang tidak ada respon dari pihak PTPN maupun masyarakat

Setelah melakukan wawancara kepada Empat narumber, peneliti mendapat hasil penelitian yang menunjukan bahwa peran pemerintah dalam Penanganan konflik antara PTPN dan Masyarakat pemerintah baik itu Kecamatan ataupun pemerintah desa Melakukan negosiasi apabila musyawara

tidak mendapat titik temu. Ini merupakan langkah akhir yang di ambil oleh pemerintah. Padahal ini yang dilakukan pemerintah daerah untuk Penanganan kedua belah pihak agar permasalahan yang terjadi ini bisa diselesaikan. Pemerintah menyarankan agar kedua belah pihak dapat menyelesaikan masalah tersebut agar tidak terjadi yang lebih buruk lagi hal ini sesuai dengan konflik yang berlarut-larut

K. Peran pemerintah dalam Menverifikasi lahan yang terdampak konflik antara PT. Perkebunan Nusantara dan masyarakat Maiwa di Kabupaten Enrekang

Dalam suatu lahan yang terkena dampak konflik sengketa pemerintah memiliki peran penting dan sudah tercantum dalam UUD NO.7 Penanganan Konflik Sosial Pasal 3. Mengacu pada Sub Bab Verifikasi merupakan proses membangun kebenaran, akurasi, atau validitas sesuatu. Verifikasi juga bisa diartikan sebagai perbandingan dua atau lebih item, atau penggunaan tes tambahan, untuk memastikan keakuratan, kebenaran, atau kebenaran informasi yang baik dalam penanganan konflik

Berdasarkan teori tersebut saya melihat pemerintah daerah Kabupaten Enrekang meberikan Verifikasi terhadap PTPN dan masyarakat Maiwa. Pemerintah menyarankan agar kedua belah pihak memverifikasi hak terselesaikannya masalah tersebut agar tidak terjadi yang lebih buruk lagi. diperlukan untuk mengukur kebenaran dan kompatibilitas satu sama lain.

Berikut hasil wawancara yang di ungkapkan oleh N.M selaku informan dengan cara Verifikasi yang membahas tentang peran pemerintah dalam penganan konflik antara PTPN dengan masyarakat Maiwa di Kabupaten Enrekang

“Solusi pemerintah pada saat itu tetap membantu masyarakat terkait dengan konflik yang sudah lama terjadi karena pemerintah adalah jembatan penghubung antara keduanya tetap memberikan solusi dan ini akan panjang karena PT PN tetap bertahan dan pemerintah kabupaten Enrekang tetap melakukan mediasi, kalau tidak salah pada tahun 1998 waktu bupati Iqbal Mustafa masih menjabat Pemkab Enrekang menverivikasi lahan masyarakat sebanyak 1.020 hektar tetapi menurut masyarakat pembagian tanah tersebut tidak adil dan tidak merata”
(Hasil wawancar dengan N.M tanggal 29 Februari)

Hasil wawancara saya dengan informan diatas yang menerangkan bahwa pemerintah kabupaten Enrekang tetap memberikan solusi dan jalan keluar dengan melakukan Verivikasi. Apa yang dilakukan oleh Pemkab Enrekang sudah tepat walaupun sebelumnya puluhan kali Pemkab Enrekang melakukan Verivikasi tapi tetap saja gagal menurut masyarakat, karena tanah mereka belum di kembalikan, dan pada tahun 1998 sebanyak 1.020 hektar tanah masyarakat di kembalikan akan tetapi masih ada masyarakat yang belum mendapatkan haknya karena dari 5.320 hektar yang di kelolah oleh perkebunan Kelapa Sawit hanya seluas 3000 hektar Hak Guna Usaha (HGU) yang seharusnya di kelola oleh PT PN Keera Maruangin.

Berikut hasil wawancara yang di ungkapkan oleh RA selaku informan yang membahas tentang peran pemerintah dalam penganan konflik antara PTPN

dengan masyarakat Maiwa di Kabupaten Enrekang.

“Pemerintah sudah memverifikasi lahan yang terkena dampak konflik di lima desa di kecamatan Maiwa sebanyak 1.020, 3000 hektar tak memiliki Hak Guna Usaha (HGU) dan 1.300 adalah lahan kosong, namu itu tidak adil karna waktu iqbal Mustafa menjabat lahan sebanyak 1.300 hektar yang tidak di gunakan di berikan kepada masyarakat dengan catatan tidak boleh di tanam tanaman jangka panjang.

Berdasarkan hasil wawancara yang di ungkapakan oleh RA selaku informan yang membahas tentang indikator Verifikasi dalam peran pemerintah dalam penganan konflik antara PTPN dan masyarakat Maiwa di Kabupaten Enrekang, bahwa pemerintah benar banar memberikan sesuai ketentuan yang berlaku namu masih tidak di terima karena masih banyak masarakat yang belum mendapatkan haknya

Setelah melakukan wawancara kepada kedua narumber, peneliti mendapat hasil penelitian yang menunjukan bahwa peran pemerintah dalam verifikasi Lahan yang terdampak konflik antara PTPN dan Masyarakat pemerintah telah menetapkan lahan mana yang termasuk milik warga lahan kosong dan lahan Tak Ber HGU untuk menangani masalah ini sebagai orang ketiga yang netral sehingga kedepanya masyarakat dan PT.PN tidak lagi berkonflik .

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada Bab ini memuat kesimpulan akhir dari penelitian yang telah dilakukan pada Bab sebelumnya penulis telah menjelaskan mengenai permasalahan yang diteliti yaitu tentang Penyebab terjadinya Konflik antara Masyarakat dengan PT. Perusahaan Nusantara XIV Unit Keera di Enrekang dan Peran Pemerintah dalam menangani Konflik antara Masyarakat dengan PT PN XIV Keera Unit Maruangin. Dengan adanya penjelasan tersebut maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa :

Peran Pemerintah Dalam Menangani Konflik Antara Masyarakat Dengan PT.PN XIV Keera Maruangin Di Enrekang

Hasil akhir penulis dapat menyimpulkan bahwa Berdasarkan laporan penelitian diperoleh fakta bahwa peran pemerintah dalam menangani konflik dapat di petakan dalam dua hal : 1). Mediasi. Dalam hal ini, pemerintah kabupaten Enrekang melakukan mediasi, memfasilitasi dan mempertemukan dua belah pihak yang berkonflik sudah berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, yaitu sebagai orang pertama dalam mengambil kebijakan. Dalam hal ini pemerintah memiliki peran fasilitator telah memberikan Penangan terhadap konflik antara masyarakat dengan PT.PN Keera Unit Maruangin sedikit demi sedikit. Pemerintah kabupaten Enrekang tetap memberikan solusi dan jalan keluar dengan melakukan mediasi.2).Penanganan, dalam Hal ini

Pemerintah kabupaten Enrekang telah melakukan pertemuan guna melakukan negosiasi pembagian lahan secara merata agar tidak terjadi konflik yang berkepanjangan 3). Verifikasi Lahan, dalam hal ini. Pemerintah Enrekang sudah melakukan verifikasi dan mengembalikan lahan masyarakat, akan pengembalian lahan yang dilakukan pemerintah tidak adil dan tidak merata. Meskipun penanganan dari pemerintah tersebut masih tergolong lemah, akan tetapi dalam hal ini pemerintah sudah bersikap netral, tanpa membedakan satu sama lainnya. Kebijakan pemerintah dalam menyikapi setiap permasalahan yang terjadi sudah tepat mempertemukan kedua belah pihak yakni Masyarakat dengan PT.PN Keera Unit Maruangen dan juga Pemerintah Enrekang melakukan verifikasi lahan tersebut harus hati-hati karena potensi konflik besar kemungkinan akan terjadi karena warga mengklaim tanah yang selama ini dikuasai oleh PT.PN hanya mengandalkan bukti alam saja tidak secara administrasi atau tidak mempunyai sertifikat tanah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang penulis jelaskan diatas maka adapun Saran penelitian yang direkomendasikan yaitu sebagai berikut:

1. Pemerintah diharapkan memberikan perhatian penuh terhadap konflik masyarakat dengan PT.PN XIV Keera Maruangen karena peran pemerintah dalam konflik tersebut sangat berperan penting dalam Penanganan konflik lahan dan pemerintah Enrekang adalah jembatan penghubung antara keduanya.

2. Dalam melakukan verifikasi, Badan Pertahanan Nasional (BPN) dan pemerintah Kabupaten Enrekang harus lebih hati-hati dalam pengukuran, mereka tidak bisa berpihak kepada siapa-siapa karena konflik PTPN dengan masyarakat masih belum selesai.

Kunci utama dalam Penanganan konflik adalah komunikasi, dengan melakukan komunikasi yang tepat di harapkan juga mendapat solusi dan jalan terbaik. Dalam hal ini pemerintah berperan sebagai penengah antara perusahaan dengan masyarakat, pemerintah harus adil dan tidak boleh memihak kesalah satu kelompok, yang menjadi penyelesaian dari konflik tersebut adalah pemerintah yang benar-benar harus mengambil sikap tegas antara kedua belah pihak.

Daftar Pustaka

- A. Coser, Lewis. *The Funcation Of Social Conflict*, New York: The free Press, 1964.
- Agustino, Leo. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Bandung: CV Alfabeta, 2014.
- Aliyah, Nur. *Manajemen Konflik*, Makassar: Alauddin University Press, 2015.
- Chilcote, Ronald. *Teori Perbandingan Poltik: Penulusuran Pradigma*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Miall Hugh, Oliver Rambotam Tom Woodhouse. *Resolusi damai Konflik kontemporer*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- Dapartemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Al-karim Dan Terjemahnya*, Bandung: Cv Penerbit Dipongoro, 2004.
- Duverger, Maurice. *Sosiologi Politik*, Jakarta: Yayasan Ilmu-ilmu Sosial, 1996.
- Fisher, Simon Dkk. *Mengelola Konflik Keterampilan dan Straegi untuk Bertindak*, Jakarta: The British Council Indonesia, 2000.
- Handayani, Sri. *Ilmu Politik: Kebijakan Kesehatan*, Yogyakarta: Gosyen Publishing, 2011.
- Heywood, Andrew. *Politik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Jurdi, Syarifuddin. *Bahan Perkuliahan Tata Kelola Konflik*, Makassar: Alauddin University Press, 2014.
- Mulyana, Deddy. *Meteodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Sosial*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarta, 2004.
- Nasikun. *System Social Indonesia*, Jakarta: Universitas Gajah Mada-Rjawali, 1989.
- Noor, Juliansyah. *Meteodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi Dan Karya Ilmiah*, Jakarta: Kencana Penanda Media Group, 2012.

Parsons, Wayne. *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2005.

Schroder, Peter. *Strategi Politik*, Jakarta: Friedrich Naumann Stiftung, 2004.

Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep Teori dan Aplikasinya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Sobur, Alex. *Semiotika Komunikasi*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya 2006.

Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2015.

SKRIPSI

Husniyah, Risqi, "*Solusi Pemerintah Daerah Terhadap Konflik Sosial Di Desa Taman Asri Kecamatan Purbolinggo Dan Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lambung Utara*", Jurusan Ilmu Pemerintahan, Universitas Diponegoro, 2013.

Risman, Hendrik, *Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat Dalam Menyelesaikan Konflik Tapal Batas Antar Kampung Di Daerah Kabupaten Kutai Barat (Konflik Kampung Muhur Dan Kampung Kaliq)*, Universitas Mulawarman, 2015.

Siswanto, Ayyub, "*Peran Pemerintah Daerah Dalam Mengatasi Konflik Antara Kelompok Di Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara*", Jurusan Ilmu Pemerintahan, Universitas Hasanuddin, 2014.

Manji, Taufiq, "*Studi Analisa Pemerintah Kota Terhadap Perkelahian Antar Kelompok Di Kota Makassar*", Jurusan Ilmu Pemerintahan, Universitas Hasanuddin, 2011.

Risman, Hendrik, *Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat Dalam Menyelesaikan Konflik Tapal Batas Antar Kampung Di Daerah Kabupaten Kutai Barat (Konflik Kampung Muhur Dan Kampung Kaliq)*, Universitas Mulawarman, 2015.

Lampiran



Keterangan : Photo bersama dengan Wakil Bupati Asma, SE Tanggal 23 Februari 2022 Di Kediaman Beliau Setelah Wawancara



Keterangan : Photo bersama dengan Kabag.Adm Pemerintahan Dan Kabag Hukum Tanggal 29 Februari 2022 Di Sela Wawancara



Keterangan : Photo bersama dengan Bapak Syaripuddin, S.Sos selaku Kasi Trautib kecamatan Maiwa Tanggal 28 Februari



Keterangan : Photo di Pintu Masuk PT Perkabunan Nusantara XIV Unit Maruangen yang dulunya Bekas Pabrik Tepung Tapioka Tanggal 15 Maret 2022



Keterangan : Photo Lahan Warga yang Sawahnya sudah rata dengan tanah
(Doc Tanggal 15 maret 2022)





**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp 8009723 Fax 04113653889 Makassar 90221 E-mail: lp3m@umma.ac.id



Nomor : 383/05/C 4-VIII/II/43/2022

Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Bapak / Ibu Bupati Enrekang

Cq. Ka. Kantor Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu

di -

Enrekang

14 Rajab 1443 H

15 February 2022 M

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 0127/ST/A.6-VIII/II/1443H/2022M tanggal 4 Februari 2022, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : **ALMUKRAM**

No. Stambuk : **10564 0232815**

Fakultas : **Fakultas Sosial dan Politik**

Jurusan : **Ilmu Pemerintahan**

Pekerjaan : **Mahasiswa**

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul

"Peran Pemerintah Daerah dalam Penanganan Konflik Antara PT, Perkebunan Nusantara dan Masyarakat Mawa di Kabupaten Enrekang"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 18 Februari 2022 s/d 18 April 2022

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran katziraa.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LP3M,



Dr. Ir. Abubakar Idhan, MP,

RSM 101 7716



**PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG
SEKRETARIAT DAERAH**

Jln. Jend. Sudirman No.01 Enrekang ☎ (0420) 21019 fax (0420) 21551 website
www.enrekang.go.id Email humas.enrekang@yahoo.com Kode Pos 91711

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

NO : 420/355/SETDA/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : NURIANNAH MANDEHA, S. KM, M. SI
NIP : 19790605 200212 2 008
PANGKAT/GOL : PEMBINA TK. I / IV/b
JABATAN : ASISTEN ADM. UMUM SETDA KAB. ENREKANG

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : ALMUKRAM
Nim : 105640232815
Tempat Tgl.Lahir : GURA, 24 AGUSTUS 1995
Jurusan/Fakultas : ILMU PEMERINTAHAN
Universitas : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Telah melakukan Kegiatan Penelitian pada Bagian Hukum Kantor Sekretariat Daerah Kab. Enrekang selama 2 Bulan dari tanggal 18 Februari s/d 18 April 2022 dengan judul Penelitian **"Peran Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Konflik Antara PT. Perkebunan Nusantara dan Masyarakat Melayu di Kab. Enrekang"**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Enrekang
Pada Tanggal : 18 April 2022

An. SEKRETARIS DAERAH,
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM,

NURIANNAH MANDEHA, S.KM,M.SI

Pangkat : PEMBINA TK. I (IV/b)
NIP : 19851007 200903 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jenderal Sudirman Km. 3 Pinang Enrekang Telp./Fax (0420)-21079
ENREKANG

Enrekang, 16 Februari 2022

Nomor : 75/DPMTSP/P/II/2022
 Lampiran : -
 Perihal : Izin Penelitian

Kepada
 Yth. Kepala Desa Boto Malangga
 Di
 Kec. Maiwa

Berdasarkan surat dari Ketua Lembaga Penelitian Pengembangan Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor: 383/05/C.4-VIII/II/43/2022 tanggal 15 Februari 2022, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Almukram
 Tempat Tanggal Lahir : Gura, 24 Agustus 1995
 Instansi/Pekerjaan : Mahasiswa
 Alamat : BT, Riri Desa BT Mondong Kec. Buntu Batu

Bermaksud akan mengadakan Penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul: "Peran Pemerintahan Daerah Dalam Penanganan Konflik Antara PT. Perkebunan Nusantara dan Masyarakat Maiwa di Kabupaten Enrekang."

Dilaksanakan mulai, Tanggal 18 Februari 2022 s/d 18 April 2022

Pengikut/Anggota :-

Pada Prinsipnya dapat menyetujui kegiatan tersebut diatas dengan ketentuan:

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan harus melaporkan diri kepada Pemerintah/Instansi setempat.
2. Tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan
3. Mentaati semua peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat
4. Menyerahkan 1 (satu) berkas fotocopy hasil skripsi kepada Bupati Enrekang Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Enrekang.

Demikian untuk mendapat perhatian

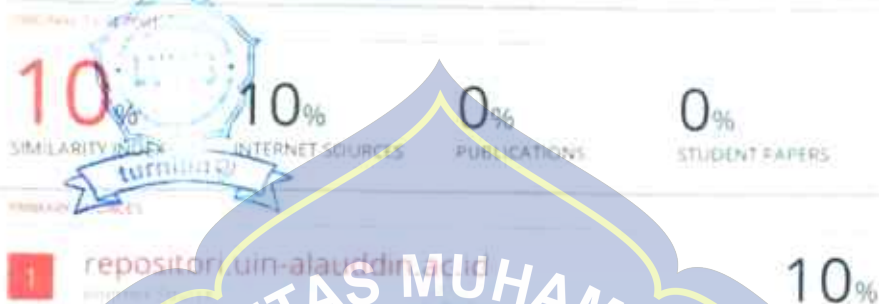
A.n. BUPATI ENREKANG
 Kepala DPMPTSP Kab. Enrekang

Dr. Ir. CHAIDAR SOLU, ST, MT
 Pangkat: Pembina Tk. I
 NIP. 19750528 200212 1 005

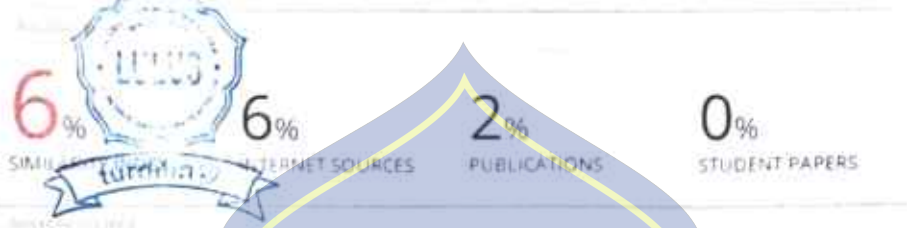
Tembusan Tth:

01. Bupati Enrekang (Sebagai Laporan),
02. Kepala BAKESBAN/POL Kab. Enrekang,
03. Camat Maiwa,
04. Universitas Muhammadiyah Makassar,

BAB I Almkram 105640232815



BAB II Al-mukram 105640232815



BAB III Almkram 105640232815

10%

SIMILARITY INDEX

7%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

1

digilib.unismuh.ac.id

7%

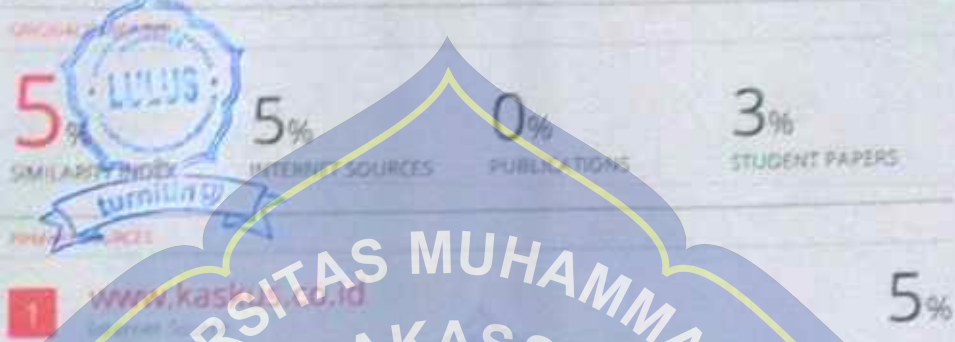
2

State Higher Education Commission

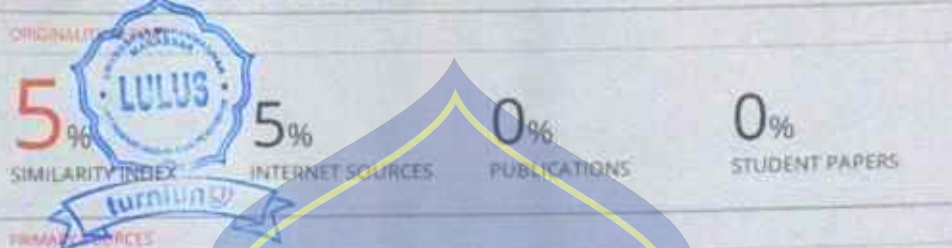
3%

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
UPTI PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

BAB IV Alnukram 105640232815



BAB V Almkram 105640232815



1	repository.radenarlan.ac.id	Internet Source	3%
2	eprints.ung.ac.id	Internet Source	2%

Exclude quotes

Exclude bibliography

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR

UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

BIOGRAFI PENULIS



ALMUKRAM. Dilahirkan di Gura Desa BT.Mondong Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang pada tanggal 24 Agustus 1995. Penulis lahir dari pasangan Alm.Rasulu dan Haina merupakan Anak ke Delapan dari Sebelas Bersaudara. Penulis memasuki jenjang Pendidikan Dasar di bangku SD NO 79 Gura Kecamatan

Buntu Batu Kabupaten Enrekang pada tahun 2004 dan tamat pada tahun 2009. Selanjutnya, penulis melanjutkan Pendidikan ke MTsN Negeri Baraka pada tahun 2009 dan tamat pada tahun 2012. Kemudian di tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan ke MAN Negeri 5 Baraka pada Tahun 2012 dan tamat Pada tahun 2015, penulis kembali melanjutkan pendidikan ke Universitas Muhammadiyah Makassar dan diterima sebagai mahasiswa jurusan Ilmu pemerintahan, program Strata Satu S-1, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan selesai tahun 2022.

Berkat perlindungan dan pertolongan Allah SWT serta iringan doa dari orang tua, sehingga perjuangan panjang dan kerja keras penulis dalam mengikuti pendidikan di perguruan tinggi dapat diselesaikan dengan tersusunnya skripsi yang berjudul “Peran Pemerintah Daerah dalam Penanganan Konflik antara PTPN dan Masyarakat Maiwa di Kabupaten Enrekang”.